

**PENGARUH UMUR PEMERINTAH DAERAH, *LEVERAGE* DAN
KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DAN
NON KEUANGAN DI *WEBSITE*
PEMERINTAH DAERAH**

(Tesis)

**Oleh
ADRIENT DESIANA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

The Impact of Local Government Age, Leverage and Local Government Dependence on Financial and Non Financial Disclosure in Local Government Website

By

Adrient desiana

This study aims to investigate the impact of local government age, leverage and local government dependence on financial and non financial level disclosure in local government website in Indonesia. Our conceptual framework derived from agency theory and signalling theory. Our model is divided into two namely the first model for financial level disclosure and the second for non financial level disclosure.

We analyzed 128 sample in model I and 360 sample in model II using purposive data method. Multiple regression is used for testing the model in SPSS 18 version. This study used mandatory financial disclosure based on Inpres No. 7 in 2005 and voluntary non financial disclosure based on Urban Sector Development Regional Program (USDRP).

The results shows that local government age have significant effect on non financial disclosure in local government website. The local government dependence have significant effect on financial and non financial disclosure in local government website. While leverage has no significant effect on financial and non financial disclosure in local government website.

Keywords: disclosure, local government website, age, leverage, dependence

ABSTRAK

Pengaruh Umur Pemerintah Daerah, *Leverage* dan Ketergantungan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan di Website Pemerintah Daerah

Oleh

Adrient desiana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur pemerintah daerah, *leverage* dan ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di website pemerintah daerah di Indonesia. Kerangka pemikiran berdasar pada teori keagenan dan teori sinyal. Model penelitian terbagi menjadi dua yaitu model I untuk tingkat pengungkapan informasi keuangan dan model II untuk tingkat pengungkapan non keuangan.

Penelitian ini menggunakan sampel 128 daerah pada model I dan 360 daerah pada model II dengan metode pemilihan sampel adalah *purposive sampling*. Data diolah menggunakan regresi berganda dengan SPSS versi 18. Penelitian ini menggunakan Inpres No. 7 tahun 2015 sebagai dasar kewajiban pengungkapan informasi keuangan dan *Urban Sector Development Regional Program* (USDRP) sebagai dasar pengungkapan sukarela indeks non keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan umur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah di Indonesia. Ketergantungan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di *website* pemerintah daerah di Indonesia. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di *website* pemerintah daerah di Indonesia

Kata kunci: pengungkapan, website pemerintah daerah, umur, *leverage*, ketergantungan

**PENGARUH UMUR PEMERINTAH DAERAH, *LEVERAGE* DAN
KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DAN
NON KEUANGAN DI *WEBSITE*
PEMERINTAH DAERAH**

Oleh

ADRIENT DESIANA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Tesis

**: PENGARUH UMUR PEMERINTAH
DAERAH, LEVERAGE DAN
KETERGANTUNGAN DAERAH
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
INFORMASI KEUANGAN DAN NON
KEUANGAN DI WEBSITE PEMERINTAH
DAERAH**

Nama Mahasiswa

: Adrient Desiana

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1521031032

Program Studi


: Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas

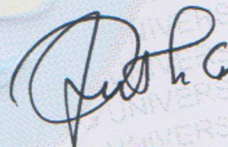
: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

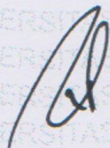


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001



Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19700801 199512 2 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi



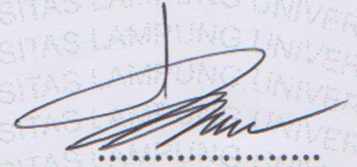
Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199501 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**



Sekretaris

: **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**



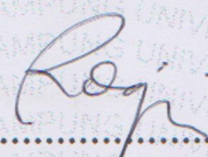
Penguji Utama

: **Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.**



Sekretaris Penguji

: **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

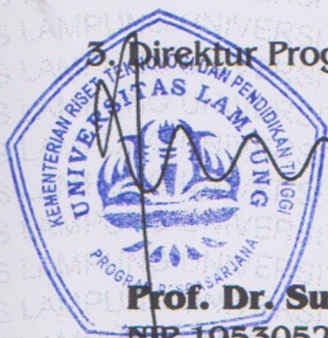
NIP 19610904 198703 1 011



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP 19530528 198103 1 002



Tanggal Lulus : **08 Agustus 2017**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Pengaruh Umur Pemerintah Daerah, *Leverage* dan Ketergantungan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan di *Website* Pemerintah Daerah” adalah karya saya dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak atas intelektual atas karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada pihak Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata terdapat adanya kekeliruan, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2017

Pembuat Pernyataan



Aurient Desiana
NPM 1521031032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	9
1.3 Tujuan penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	11
2.1 Teori yang mendasari.....	11
2.1.1 Teori Keagenan.....	11
2.1.2 <i>Signalling Theory</i>	13
2.1.3 <i>e-Government</i>	14
2.1.4 Pengungkapan Informasi Keuangan.....	18
2.1.5 Pengungkapan Informasi Non Keuangan.....	20
2.1.6 Umur Administratif Pemerintah Daerah.....	21
2.1.7 <i>Leverage</i>	22
2.1.8 Ketergantungan Daerah	24
2.2 Penelitian terdahulu.....	25
2.3 Pengembangan Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Populasi dan Sampel	38
3.2 Data Penelitian	39
3.3 Definisi operasional variabel penelitian.....	40
3.4 Model analisis	43
3.5 Metode Analisis dan alat analisis.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian	49
4.2 Statistik Deskriptif Model I.....	51
4.3 Statistik Deskriptif Model II	55
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	60
4.4.1 Uji Normalitas.....	60

4.4.2 Uji Multikolinearitas	61
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	62
4.4.4 Uji Autokorelasi	63
4.5 Pengujian Model Regresi	64
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi Adjusted R ²	64
4.5.2 Uji Kelayakan Model.....	65
4.5.3 Uji t.....	66
4.6 Pembahasan	69
4.6.1 Pengaruh umur daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di <i>website</i> pemerintah daerah	69
4.6.2 Pengaruh <i>leverage</i> terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di <i>website</i> pemerintah daerah....	74
4.6.3 Pengaruh ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di <i>website</i> pemerintah daerah	79
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Simpulan	84
5.2 Keterbatasan	85
5.3 Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian-penelitian terdahulu	27
Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Penentuan Sampel Penelitian	38
Tabel 3.2 Indeks Pengungkapan Informasi Keuangan.....	40
Tabel 3.3 Indeks Pengungkapan Informasi Non Keuangan.....	41
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 4.1 Jumlah sampel Kabupaten/Kota Per Propinsi di Indonesia	50
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik Model I	52
Tabel 4.3 Frekuensi Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan	54
Tabel 4.4 Jumlah <i>website</i> Pemerintah Daerah berdasar jenis informasi dalam indeks pengungkapan informasi keuangan.....	54
Tabel 4.5 Deskriptif statistik Model II.....	55
Tabel 4.6 Frekuensi Tingkat Pengungkapan Informasin Non Keuangan .	57
Tabel 4.7 Jenis Informasi yang ditampilkan	59
Tabel 4.8 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Model I dan II.....	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas Model I dan II	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser Model I	63
Tabel 4.11 Nilai Durbin Watson Model I	63
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi Majemuk	64
Tabel 4.13 Uji F Model I dan II	65
Tabel 4.14 Hasil Uji T Model I.....	66
Tabel 4.15 Hasil Uji T Model I.....	67
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Uji T.....	68
Tabel 4.17 Hasil uji T dan simpulan terhadap hipotesis	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model I.....	44
Gambar 3.1 Model II.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan penggunaan *website* oleh pemerintah daerah di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia dan diperjelas dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*. Tujuh tahun kemudian, karena tuntutan peningkatan kapasitas *Good Government Governance* yang baik terutama untuk faktor transparansi dan akuntabilitas, pemerintah mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Nomor 14/2008 mengamanatkan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pasal 7 ayat 6 UU nomor 14 tahun 2008 menyebutkan untuk dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Selain kewajiban tersebut, pasal 9 ayat 1 juga mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, yang meliputi informasi yang terkait dengan

badan publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya amanat undang-undang untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui media elektronik semisal *website* mencerminkan bahwa Indonesia sudah memasuki era keterbukaan data dan informasi. Selain mengeluarkan berbagai peraturan dan perundangan untuk meningkatkan pengungkapan informasi kepada publik, Indonesia juga tergabung dalam organisasi internasional yang mendukung keterbukaan data dan informasi. Sejak tahun 2011 Indonesia tergabung dalam *Open Government Partnership* yang merupakan sebuah inisiatif sukarela di tingkat Internasional yang bertujuan untuk menjamin komitmen pemerintah kepada warganya dalam meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat, melawan korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat sistem pemerintahan.

Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif. Dengan tim inti adalah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP-PPP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk

Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, dan *Transparency International Indonesia (TII)*, Gerakan Anti Korupsi Aceh (Gerak Aceh), JARI Indonesia, dan Komite Pemantau Legislatif Makassar (KOPEL) Makassar.

Untuk mendukung pengungkapan informasi keuangan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015, Perihal Pelaksanaan Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang mengamanatkan untuk masing-masing kepala daerah untuk Menyampaikan Laporan Pelaksanaan TPAD Pada Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Masing-Masing. Dalam Rencana Aksi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) Tahun 2015 poin *e-Government* dan keterbukaan informasi publik, ukuran keberhasilannya adalah terpublikasinya data mutakhir melalui website masing-masing Pemerintah Daerah, yaitu: Ringkasan RKA SKPD; Ringkasan RKA PPKD; Raperda APBD; Raperda Perubahan APBD; Perda APBD; Perda Perubahan APBD; Ringkasan DPA SKPD; Ringkasan DPA PPKD; LRA seluruh SKPD; LRA PPKD; LKPD Yang Sudah Di Audit; Opini atas LKPD.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada bulan Desember 2015 (B12) melakukan verifikasi terhadap target capaian Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 TPAD Provinsi dengan hasil:

- a. Daerah Provinsi yang telah melakukan pelaporan capaian keberhasilan B12 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015, capaian 100%, adalah:
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, NTB, dan Papua.
- b. Daerah Provinsi yang tidak melakukan pelaporan capaian keberhasilan B12 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015., capaian 0%, adalah:
Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Kalimantan Utara (Kementerian Dalam Negeri RI, 2016).

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 ada 12 poin penting dari laporan keuangan yang harus muncul di *website* pemerintah daerah. Namun, hasil verifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan ada tujuh propinsi di Indonesia yang belum berhasil mencapai capaian 12 laporan keuangan yang harus muncul di websitenya. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua propinsi di Indonesia memaksimalkan pengungkapan laporan keuangan lewat media *website*.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah dan lembaga kementerian/non kementerian untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala. Selain itu Instruksi Presiden ini juga mengamanatkan untuk menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.

Untuk meningkatkan kemudahan publik mendapatkan data secara cepat dapat melalui media elektronik, Kantor Staf Presiden mendukung dan berupaya penuh untuk melakukan pembenahan atas data pemerintah Indonesia Melalui Satu Data. Portal resmi data Indonesia yang beralamat pada data.go.id merupakan wujud operasionalisasi inisiatif Satu Data. Portal ini berisi data kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintahan daerah, dan semua instansi lain yang terkait yang menghasilkan data yang berhubungan dengan Indonesia. Data tersedia dalam format terbuka dan mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan (Satu Data Indonesia, 2016)

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengungkapan data dan informasi kepada publik melalui *website* antara lain adalah belum maksimalnya transparansi informasi keuangan dan informasi non keuangan yang ditampilkan Pemerintah Daerah di websitenya. Hal ini terlihat dari Pemeringkatan *e-Government* Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat *e-Government*, Direktorat

Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Pemingkatan *e-Government* Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2015 memperlihatkan hasil:

- a. Tahun 2012 hasilnya adalah 8 propinsi berkategori baik, 13 propinsi berkategori kurang, dan 3 propinsi berkategori sangat kurang;
- b. Tahun 2013 hasilnya adalah 11 propinsi berkategori baik dan 10 propinsi berkategori kurang;
- c. Tahun 2014 hasilnya adalah 10 propinsi berkategori baik dan 12 propinsi berkategori kurang;
- d. Tahun 2015 hasilnya adalah 13 propinsi berkategori baik dan 7 propinsi berkategori kurang (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2016).

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa belum semua propinsi ikut serta dalam proses pemingkatan *website* yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari jumlah propinsi yang mengikuti masih terdapat propinsi yang mendapat nilai kurang. Hal ini menunjukkan amanat undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memaksimalkan pengungkapan informasi di *website* belum sepenuhnya dilaksanakan.

Rendahnya upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengungkapan informasi melalui *website* juga terlihat dari sedikitnya Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di seluruh Indonesia dari 13 unit di tahun 2010, menjadi 341 unit di tahun 2015. Angka ini merupakan 49,11% dari total 620 lembaga pemerintah nasional dan daerah (*Open Government* Indonesia, 2016). Pengungkapan informasi melalui *website* daerah di Indonesia masih

termasuk rendah bila dibanding Negara lain. *The World Wide Web Foundation* merilis *Barometer Open Data* ketiga pada 21 April 2016. *Barometer Open Data* adalah tolak ukur dari inisiatif keterbukaan data di dunia yang bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan dampak dari inisiatif open data di dunia pada tahun 2014-2015. Saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-40 dari 92 negara yang diukur. Peringkat ini diperoleh dari tiga aspek yang menjadi tolak ukur *Barometer Open Data* yaitu kesiapan inisiatif open data, implementasi dan dampak yang ditimbulkan pada aspek ekonomi, politik dan sosial masyarakat (Satu Data Indonesia, 2016).

Beberapa studi dan penelitian menunjukkan tentang rendahnya pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di *website* pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian Hermana dan Silfianti (2011) menunjukkan tingkat pengungkapan ditemukan lebih banyak di level propinsi dibandingkan kotamadya atau kabupaten. Hermana, Tarigan, Medyawati dan Silfianti (2012) dan Sofia dan Husen (2013) juga menunjukkan bahwa terjadi disparitas indeks pengungkapan laporan keuangan dan non keuangan di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Sofia dan Husen (2013) juga memberikan bukti penelitian bahwa ada perbedaan indeks pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan lebih tinggi daripada keuangan.

Penelitian tentang tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada *website* pemerintah Indonesia dilakukan oleh Martani, Nastiti, dan Wicaksono (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran daerah, kemakmuran daerah, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan. Rahman, Sutaryo, dan Budiartmono (2013) dan Afriansyah dan Haryanto (2013) meneliti tentang tingkat pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian Rahman *et al* (2013) menemukan bukti bahwa kompetisi politik dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah di Indonesia.

Setyaningrum dan Syafitri (2012) menemukan pengaruh positif antara umur administratif pemerintah daerah dengan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ingram (1984) menemukan adanya ketergantungan keuangan yang besar antar pemerintah pusat dan lokal menyebabkan peningkatan pengungkapan informasi oleh pemerintah lokal untuk memudahkan pemerintah pusat mengontrol dan memonitor.

Dengan mempertimbangkan fenomena yang ada, terbatasnya penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di *website* pemerintah daerah di Indonesia, dan masih adanya perbedaan hasil penelitian menjadikan penulis ingin melakukan penelitian ulang tentang faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah di Indonesia.

Variabel yang diamati berdasar penelitian terdahulu adalah *leverage*, umur administratif pemerintah daerah dan ketergantungan daerah, sehingga penelitian ini diberi judul **Pengaruh umur administratif pemerintah daerah, *leverage*, dan ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah.**

1.2 Rumusan masalah

Masih rendahnya tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah mengindikasikan belum maksimalnya transparansi informasi dari pemerintah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan dalam penelitian ini difokuskan pada umur administratif pemerintah daerah, *leverage*, dan ketergantungan daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. apakah umur pemerintah daerah, *leverage*, dan ketergantungan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah?
- b. apakah umur pemerintah daerah, *leverage*, dan ketergantungan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada *website* pemerintah daerah?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui pengaruh umur administratif pemerintah daerah, *leverage*, dan ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah.
- b. untuk mengetahui pengaruh umur administratif pemerintah daerah, *leverage*, dan ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah, diharapkan lebih meningkatkan transparansi informasi keuangan dan non keuangan di *website* daerahnya
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi literatur bahan penelitian di sektor publik

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori yang mendasari

Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan teori sinyal serta kajian pustaka tentang *e-Government*, pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan, umur administratif pemerintah daerah, *leverage*, dan ketergantungan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab berikut:

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan memberikan pengertian bahwa ada dua peran penting dalam pengelolaan perusahaan, yaitu agen dan prinsipal. Prinsipal adalah pemilik modal. Agen adalah orang yang dipercaya prinsipal untuk mengelola perusahaan itu. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa jika kedua kelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut prinsipal.

Dalam kaitan dengan penelitian sektor pemerintahan, agen adalah pemerintah daerah yang diberi wewenang oleh masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan mempunyai informasi yang dibutuhkan masyarakat. Prinsipal adalah masyarakat, sebagai pemilik sumber daya yang mempunyai kepentingan dan memerlukan informasi (Laswad *et al*, 2005; Styles dan Tennyson, 2007;

Serrano *et al*, 2008; Caba Perez *et al*, 2014). Adanya teori keagenan pada sektor publik terlihat dengan adanya dorongan kepada pemerintah untuk dengan sukarela memberikan informasi untuk memonitor kinerja pemerintahan (Laswad *et al*, 2005).

Salah satu kendala yang akan muncul antara pemerintah daerah dan masyarakat adalah adanya asimetri informasi. Scott (2012) menyebutkan pengertian asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana agen mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal. Hendriyani dan Tahar (2015) menyebutkan dapat terjadi asimetri informasi yang menyebabkan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat. Untuk menghindari terjadinya asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat maka diperlukan pengungkapan informasi.

Pengungkapan informasi dari pemerintah kepada masyarakat sekarang menjadi topik utama untuk berbagai tujuan, antara lain memperkuat transparansi, memberantas korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan sebagainya. Afryansyah dan Haryanto (2013) menyebutkan bahwa pemerintahan yang transparan dan akuntabel mampu menyediakan pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat. Teori keagenan mendukung sebagai teori dalam penelitian ini karena relevan dengan peran pemerintah daerah sebagai agen yang menyediakan informasi bagi masyarakat (prinsipal) untuk mengurangi asimetri informasi.

2.1.2 *Signalling Theory*

Di Indonesia, *Signalling theory* dikenal dengan teori sinyal. Menurut Alvarez *et al* (2008) teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara satu pihak dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori ini dipakai dalam dunia bisnis dan menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya dan terdorong menyampaikan informasi/ sinyal tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat.

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan perusahaan yang dapat menjadi sinyal baik bagi pihak diluar perusahaan terutama pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi dan informasi non akuntansi. Martani *et al* (2014) menyebutkan informasi akuntansi adalah informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non akuntansi adalah informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan perusahaan agar investor dan stakeholder lain dapat mengambil keputusan investasi.

Laura *et al* (2010) menekankan bahwa teori sinyal penting dalam menjaga hubungan agen dan prinsipal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Laura *et al* (2010) disebutkan bahwa semakin besar dan menguntungkan perusahaan maka agen akan mengirimkan banyak sinyal baik kepada prinsipal. Teori sinyal dapat diadaptasi pada sektor publik karena teori sinyal menekankan pada bagaimana

informasi disediakan dan bagaimana pengguna meresponnya untuk mengambil keputusan.

Hendriyani dan Tahar (2015) menjelaskan bahwa pemerintah yang diberi amanah oleh rakyat berkeinginan memberikan sinyal kepada masyarakat. Pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah adalah salah satu bentuk sinyal dari pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat dan pengguna informasi lainnya dapat menginterpretasikan pengungkapan yang telah dilakukan pemerintah sesuai dengan tujuan masing-masing. Pada saat informasi diungkapkan masyarakat akan menginterpretasikan dan menganalisa informasi tersebut sebagai sinyal baik atau buruk. Dengan demikian, teori sinyal mendukung untuk digunakan dalam penelitian ini karena relevan dengan pengungkapan informasi yang dilakukan pemerintah daerah.

2.1.3 e-Government

Moon (2002) menyebutkan bahwa *e-Government* diartikan sebagai cara pemerintah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang paling inovatif, misalnya aplikasi web berbasis internet atau intranet untuk pengiriman data elektronik, *voice mail*, *email*, telepon interaktif dan layanan virtual, bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dan pebisnis ke layanan informasi pemerintah, untuk meningkatkan kualitas layanan dan menyediakan kesempatan lebih besar untuk partisipasi masyarakat dalam proses demokratis.

The World Bank (2015) memberikan penjelasan bahwa *e-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (*seperti wide area network, internet dan mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, pebisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.

Indrajit (2006) menyebutkan *e-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan melibatkan penggunaan teknologi internet. Indrajit (2006) dan Do *et al* (2011) menyebutkan bahwa keuntungan penggunaan *e-Government* adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam proses penyediaan layanan publik dan proses demokrasi.

Moon (2002) menjelaskan fungsi penggunaan situs web dalam layanan pemerintah terbagi menjadi fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal meliputi membantu administrasi pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam menyimpan, mengatur dan mengolah data dengan jumlah informasi data besar. Dengan fungsi *upload* dan *download*, informasi data terbaru bisa langsung ditampilkan secara langsung. Pemerintah bisa mengirimkan dana secara elektronik kepada agen pemerintah lain secara cepat. Selain itu fungsi internal yang lainnya adalah pemerintah bisa merespon dengan cepat atas tanggapan, keluhan atau permintaan masyarakat. Sedangkan untuk fungsi eksternal adalah teknologi berbasis web semakin mendekatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, pebisnis, dan unit pemerintahan lainnya. Situs web pemerintah menyediakan kebutuhan

komunikasi publik dan informasi dengan mudah dibagikan kepada *external stakeholder* seperti pebisnis, organisasi non profit, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Terdapat lima tingkatan *e-Government* berdasarkan tingkat interaksi pengguna (Moon, 2002) yaitu:

- a. Tingkat pertama: *e-Government* sebagai media komunikasi satu arah yaitu untuk menampilkan informasi dari pemerintah
- b. Tingkat kedua: *e-Government* digunakan sebagai media komunikasi dua arah ketika pemerintah dapat merespon dan melayani permintaan masyarakat
- c. Tingkat ketiga: *e-Government* digunakan sebagai media layanan dan transaksi keuangan
- d. Tingkat keempat: *e-Government* merupakan integrasi layanan pemerintah secara horisontal dan vertikal (*e-Government* digunakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan adanya hubungan *e-Government* antar pemerintah daerah atau antar pemerintahan dengan lainnya)
- e. Tingkat kelima: *e-Government* digunakan sebagai media partisipasi politik misalnya pemilihan dan pemungutan suara secara onlen dan adanya forum diskusi politik secara onlen.

E-Government dapat diterapkan untuk administrasi legislatif, yudikatif, atau masyarakat, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Didalam jurnal administrasi Pemerintahan Daerah volume II tahun 2005 menyebutkan ada beberapa model pelayanan *e-Government* yaitu Model penyampaian yang utama adalah

Government to Citizen atau *Government-to-Customer (G2C)*, *Government-to-Business (G2B)* dan *Government-to-Government (G2G)*. Selain model pelayanan tersebut, Indrajit (2006) menyebutkan adanya pelayanan *Government-to-Employees (G2E)* dimana aplikasi *e-Government* digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Aspek penting penunjang keberhasilan *e-Government* menurut Oktavya (2015) adalah adanya partisipasi masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang cukup dan memadai, dukungan dana dari pemerintah, dan keamanan. Penggunaan *website* oleh pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi merupakan salah satu bentuk *e-Government* karena *website* pada saat ini adalah teknologi komunikasi dan informasi canggih yang terhubung dengan internet dan mudah diakses.

Dalam penelitian ini, tingkatan *e-Government* berkaitan dengan pengungkapan informasi pada *website* oleh pemerintah daerah berada pada tingkat pertama apabila didasarkan pada tingkat interaksi antara pengguna dan pemerintah, sesuai pembagian tingkatan *e-Government* yang dijelaskan oleh Moon (2002) di atas. Hal ini dikarenakan *website* pemerintah daerah digunakan sebagai media untuk menampilkan informasi dari pemerintah.

2.1.4 Pengungkapan Informasi Keuangan

Dengan adanya *e-Government* dapat membuka informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang ada, baik informasi keuangan atau non keuangan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengungkapan atas informasi tersebut.

Suwardjono (2005) menyebutkan pengungkapan dapat dibedakan menjadi pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan.

Suwardjono (2005) juga menyatakan bahwa secara umum tujuan dari pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mewakili kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan dari pengguna.

Sofia dan Husen (2013) menyebutkan terdapat tiga tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan yaitu pengungkapan penuh, pengungkapan wajar dan pengungkapan cukup. Pengungkapan penuh mengacu pada seluruh informasi yang diberikan, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Pengungkapan cukup adalah pengungkapan informasi keuangan yang diwajibkan oleh standar

akuntansi yang berlaku. Pengungkapan wajar adalah pengungkapan cukup ditambah dengan informasi lain yang dapat berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan.

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 yang menyebutkan ada 12 poin penting dari laporan keuangan yang harus muncul di *website* pemerintah daerah, pengungkapan informasi keuangan menjadi sesuatu yang wajib ditampilkan oleh masing-masing *website* pemerintah daerah.

2.1.5 Pengungkapan Informasi Non Keuangan

Selain pengungkapan informasi keuangan, pengungkapan lain yang diperlukan adalah pengungkapan informasi non keuangan. Pengungkapan informasi non keuangan menjadi elemen penting untuk diketahui pengguna. Keseimbangan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan meningkatkan kelengkapan informasi yang dibutuhkan para pengguna sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam proses pengambilan keputusan. Sofia dan Husen (2013) menyebutkan bahwa pengungkapan informasi dapat diimplementasikan melalui berbagai media baik cetak/ *hardcopy* seperti buku laporan, artikel di koran, maupun media internet berupa penyajian di halaman web masing-masing pemerintah daerah. Media internet dianggap sebagai media yang efisien dan efektif serta ramah lingkungan karena sifatnya yang *paperless*.

Pada tahun 2003 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengedarkan buku panduan pengembangan *website* pemerintah daerah dengan salah satu isinya menyebutkan konten minimal yang harus tampil di

website pemerintah daerah ada 6 poin yaitu selayang pandang, pemerintahan daerah, geografi, peta wilayah dan sumberdaya, kebijakan dan peraturan daerah, dan buku tamu.

Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah proyek yang disiapkan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia. Salah satu kegiatannya adalah pendampingan terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi informasi melalui *website* pemerintah daerah. Pendampingan ini tidak dilaksanakan pada seluruh daerah di Indonesia secara merata, tetapi hanya pada daerah-daerah tertentu dengan harapan daerah tersebut mampu menjadi percontohan bagi daerah sekitarnya. Pada tahun 2010 USDRP mengeluarkan panduan pengembangan situs web pemerintah daerah. Dalam panduan tersebut disebutkan tambahan beberapa fitur yang harus ditampilkan dalam *website* pemerintah daerah selain dari yang telah ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Seiring dengan perkembangan waktu, konten yang ada di *website* pemerintah daerah semakin berkembang. Masing-masing pemerintah daerah berhak untuk menampilkan informasi apapun tentang daerahnya secara sukarela. Hal ini menjadikan konten yang tertampil pada *website* pemerintah daerah bervariasi. Jenis pengungkapan ini dikategorikan sebagai pengungkapan sukarela.

2.1.6 Umur Administratif Pemerintah Daerah

Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyebutkan bahwa umur administratif pemerintah daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut. Undang-undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 4 Undang-undang No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembentukan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 5 bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Semakin lama umur administratif pemerintah daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai struktur organisasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin matang, yang sadar pada peraturan dan tuntutan masyarakat, sehingga diharapkan mampu melakukan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik yang semakin besar. Informasi yang dimiliki oleh daerah yang semakin tua umurnya juga semakin

banyak sehingga diharapkan semakin lama umur administratif daerah maka semakin banyak informasi yang diungkapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara umur administratif pemerintah daerah terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.1.7 Leverage

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah menyebutkan bahwa pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan dan/atau kekurangan arus kas. Pinjaman Daerah bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat. Rahman *et al* (2013) menyebutkan bahwa *leverage* merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah

aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Trisnawati dan Ahmad (2014) menjelaskan bahwa kreditor akan mengawasi pemerintah daerah dalam menggunakan dana yang dipinjam dan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi pinjaman tersebut. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pengawasan yang dilakukan kreditor, hal ini menyebabkan pemerintah daerah harus menanggung dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan pengawasan kreditor.

Cara efektif untuk mengurangi pengeluaran dana besar adalah dengan menggunakan internet atau *website* pemerintah daerah dalam pengungkapan informasi. Dengan melalui media *website* maka pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan kreditor dalam melakukan pengawasan. Dalam penelitian Rahman *et al* (2013) juga disebutkan bahwa pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan melalui *website* dapat digunakan untuk mengalihkan fokus utama masyarakat terhadap tingginya *leverage* pemerintah daerah.

2.1.8 Ketergantungan Daerah

Styles dan Tennyson (2007) menyebutkan bahwa kondisi keuangan daerah dapat diukur dengan ketergantungan daerah. Bisma dan Susanto (2010) memberi definisi tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, yang diukur dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan total

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Mahmudi (2007) menyebutkan bahwa tingkat ketergantungan dapat diukur dengan rasio ketergantungan keuangan daerah, dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi. Martani dan Liestiani (2012) menggunakan ukuran total dana alokasi umum dibagi dengan total pendapatan untuk mengukur ketergantungan daerah. Pandansari (2016) menggunakan dana perimbangan dibagi total pendapatan untuk mengukur rasio ketergantungan daerah.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Komponen dana perimbangan ada tiga yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil (Kementerian keuangan, 2016).

2.2 Penelitian terdahulu

Laswad *et al* (2005); Styles dan Tennyson (2007); Serrano *et al* (2008); Caba-Perez *et al* (2014); Afryansyah dan Haryanto (2013); Rahman *et al* (2013); Trisnawati dan Ahmad (2014) melakukan penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah. Laswad *et al* (2005) melakukan penelitian pada pemerintah lokal di New Zealand. Hasilnya menemukan bahwa variabel *wealth*, *leverage*, tipe pemerintahan dan visibilitas pers berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet. Variabel ukuran daerah dan kompetisi politik tidak berpengaruh signifikan.

Styles dan Tennyson (2007) melakukan penelitian dengan sampel 300 pemerintah lokal di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa kota dengan pendapatan per kapita yang tinggi lebih banyak mengungkapkan informasi keuangan di internet. Hasil lainnya adalah ketersediaan informasi keuangan di internet berhubungan positif dengan jumlah penduduk, jumlah pendapatan per kapita, tingkat hutang dan kondisi keuangan pemerintah.

Serrano *et al* (2008) melakukan penelitian terhadap 92 pemerintah lokal di Spanyol mengenai faktor-faktor yang mendorong pengungkapan informasi keuangan secara sukarela di internet. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah, surat obligasi daerah, situasi politik, visibilitas internet, kekayaan masyarakat dan tingkat budaya masyarakat berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet. Variabel kondisi keuangan pemerintah dan tingkat

e-Government tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah dilakukan oleh Martani *et al* (2014). Penelitian tersebut dilakukan terhadap 434 pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan indeks non keuangan yang dikembangkan dari Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007. Hasilnya menunjukkan variabel tingkat pendidikan, kemakmuran daerah, ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website pemerintah daerah, sedangkan variabel kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan dengan menggunakan variabel bebas informasi keuangan dan non keuangan dilakukan oleh Garcia-Sanchez *et al* (2013). Penelitian dilakukan dengan sampel terdiri dari 102 *website* pemerintah lokal di Spanyol dengan menggunakan indeks pengungkapan informasi ekonomi, sosial dan lingkungan. Hasilnya menunjukkan ukuran daerah, ideology politik dan kompetisi politik berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Variabel tingkat pengangguran, tipe pemerintahan, kemampuan keuangan daerah dan kekuatan politik tidak berpengaruh signifikan. Berikut ini adalah tabel rincian penelitian tersebut:

Tabel 2.1
 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Teori yang dipakai	Variabel	Hasil
Penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan informasi keuangan di website pemerintah daerah				
1	Laswad <i>et al</i> (2005)	Teori keagenan	Variabel terikat: pelaporan keuangan secara sukarela di internet oleh Pemerintah daerah (Y) Variabel bebas: Kompetensi politik (X1), Ukuran (X2), <i>leverage</i> (X3), <i>wealth</i> (X4), Visibilitas pers (X5), Tipe Pemda (X6)	Variabel berpengaruh signifikan: <i>wealth</i> , <i>leverage</i> visibilitas pers, tipe pemerintahan Variabel tidak berpengaruh signifikan: ukuran dan kompetisi politik.
2	Styles dan Tennyson (2007)	Teori keagenan	Variabel terikat: Ketersediaan dan aksesibilitas data keuangan di internet(Y) Variabel bebas: ukuran daerah (X1), Struktur pemerintahan (X2), kualitas pengungkapan akuntansi (X3), Pendapatan per kapita (X4), Tingkat hutang (X5), Kondisi keuangan (X6)	Variabel yang berpengaruh signifikan: ukuran daerah, pendapatan per kapita, tingkat hutang, dan kondisi keuangan Variabel tidak berpengaruh signifikan: struktur pemerintahan dan kualitas pengungkapan akuntansi
3	Serrano <i>et al</i> (2008)	1. Teori keagenan 2. Teori legitimasi	Variabel terikat : pengungkapan laporan keuangan Pemda di internet (Y) Variabel bebas: ukuran (X1), Surat obligasi daerah (X2), kondisi keuangan (X3), Situasi politik (X4), tingkat e-Government (X5), Visibilitas internet (X6), Kekayaan masyarakat (X7), tingkat budaya (X8)	Variabel yang berpengaruh signifikan : ukuran, surat obligasi daerah, situasi politik, visibilitas internet, kekayaan masyarakat dan tingkat budaya masyarakat. Variabel tidak berpengaruh signifikan : kondisi keuangan dan tingkat e-government

Tabel 2.1 Lanjutan

4	Caba-Perez <i>et al</i> (2014)	1. Teori keagenan 2. <i>Incentive theory</i>	Variabel terikat: pengungkapan informasi keuangan Variabel bebas: kompetisi politik (X1), tingkat pendidikan (X2), jumlah penduduk (X3), rumah tangga dengan akses internet (X4), bentuk pemerintahan (X5), hutang (X6), kemakmuran daerah (X7), <i>fiscal pressure</i> (X8)	Variabel berpengaruh signifikan: hutang, Kompetisi politik Variabel tidak berpengaruh signifikan: tingkat pendidikan, jumlah penduduk, rumah tangga dengan akses internet, bentuk pemerintahan, kemakmuran daerah, <i>fiscal pressure</i>
5	Afryansyah, Haryanto(2013)	Teori keagenan	Variabel terikat: tingkat pengungkapan informasi akuntansi (Y) variabel bebas: visibilitas pers (X1), ukuran daerah (X2), tingkat investasi (X3), kekayaan daerah (X4) dan kompetisi politik (X5)	Variabel berpengaruh signifikan: visibilitas pers Variabel tidak berpengaruh signifikan: ukuran daerah, tingkat investasi, kekayaan daerah dan kompetisi politik
6	Rahman <i>et al</i> (2013)	Teori keagenan	variabel terikat: pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet (Y) variabel bebas: kompetisi politik(X1), ukuran pemerintah lokal (X2), <i>Leverage</i> (X3), kemakmuran pemerintah lokal (X4), dan tipe pemerintahan (X5).	Variabel berpengaruh signifikan: kompetisi politik, <i>leverage</i> , dan kemakmuran pemerintah lokal Variabel tidak berpengaruh signifikan: ukuran dan tipe pemerintahan
7	Trisnawati dan Ahmad (2014)	1. Teori keagenan 2. <i>signalling theory</i>	variabel terikat: publikasi laporan keuangan pemda melalui internet (Y) variabel bebas : kompetisi politik (X1), ukuran pemda(X2), rasio pembiayaan utang (X3), dan kekayaan pemda(X4), tipe pemda (X5), dan opini audit (X6)	Variabel berpengaruh signifikan: kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan utang, dan kekayaan pemda Variabel tidak berpengaruh signifikan: tipe pemda dan opini audit

Tabel 2.1 Lanjutan

Penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan informasi non keuangan di website pemerintah daerah				
8	Martani <i>et al</i> (2014)	Teori keagenan	variabel terikat: tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada website (Y) variabel bebas : tingkat pendidikan (X1), kemakmuran daerah(X2), ukuran daerah (X3), dan tingkat kemandirian daerah (X4)	Variabel berpengaruh signifikan: tingkat pendidikan, kemakmuran daerah, ukuran daerah. Variabel tidak berpengaruh signifikan: kemandirian daerah
Penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di website Pemerintah Daerah				
9	Garcia-Sanchez <i>et al</i> (2013)	1. Teori legitimasi 2. Teori stakeholder	Variabel terikat: tingkat pengungkapan informasi (Y) Variabel bebas: tingkat penganggaran (X1), tipe pemerintahan(X2), ukuran daerah (X3)kemampuan keuangan daerah (X4), ideology politik (X5),kompetisi politik (X6), dan kekuatan politik (X7)	Variabel berpengaruh signifikan: ukuran daerah, ideology politik dan kompetisi politik Variabel tidak berpengaruh signifikan: tingkat penganggaran, tipe pemerintahan, kemampuan keuangan daerah dan kekuatan politik

2.2.1 Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat adanya perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Perbedaan tersebut terutama dari variabel-variabel yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan variabel terikat: tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan, variabel bebas: umur administratif pemerintah daerah, *leverage*, dan ketergantungan daerah. Berikut ini adalah tabel perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan ditemukan penelitian terdahulu:

Tabel 2.2
 Persamaan dan Perbedaan Penelitian
 Penulis dengan Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Sampel penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Laswad <i>et al</i> (2005)	Pemerintah Lokal di New Zealand	Variabel bebas : <i>leverage</i>	Variabel terikat pada penelitian Laswad,dkk (2005) hanya pengungkapan informasi keuangan
2	Styles dan Tennyson (2007)	Pemerintah Lokal di United States	Variabel bebas : <i>leverage</i>	Variabel terikat pada penelitian Styles dan Tennyson (2007) hanya pengungkapan informasi keuangan
3	Serrano <i>et al</i> (2008)	Pemerintah Lokal di Spanyol	Variabel terikat dengan menggunakan tingkat informasi keuangan	Variabel bebas pada penelitian Serrano dkk (2008) berbeda
4	Caba Perez, <i>et al</i> (2014)	Pemerintah Lokal di Spanyol	Variabel bebas : <i>leverage</i>	Variabel terikat pada penelitian Caba Perez,dkk (2014)hanya pengungkapan informasi keuangan
5	Afryansyah, Haryanto(2013)	Pemerintah daerah di Indonesia	Variabel terikat : Tingkat pengungkapan informasi keuangan	Variabel bebas pada penelitian Afryansyah, Haryanto(2013) berbeda
6	Rahman <i>et al</i> (2013)	Pemerintah daerah di Indonesia	Variabel bebas : <i>Leverage</i>	Variabel terikat pada penelitian Rahman,Dkk (2013) hanya pengungkapan informasi keuangan
7	Trisnawati dan Ahmad (2014)	Pemerintah daerah di Indonesia	Variabel bebas : <i>Leverage</i>	Variabel terikat pada penelitian Trisnawati dan Ahmad (2014) hanya pengungkapan informasi keuangan
8	Martani <i>et al</i> (2014)	Pemerintah daerah di Indonesia	Variabel terikat: Tingkat pengungkapan informasi non keuangan	Variabel bebas pada penelitian Martani, dkk (2014) berbeda
9	Garcia-Sanchez, <i>et al</i> (2013)	Pemerintah Lokal di Spanyol	Variabel terikat: pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan	Indeks pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang digunakan penulis dan Garcia-Sanchez, dkk (2013) berbeda

Secara keseluruhan tidak ditemukan adanya penggunaan secara bersama-sama variabel bebas dan terikat yang mengacu pada satu penelitian tertentu. Pada masing-masing penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian ini.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh umur administratif pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah

Umur administratif pemerintah daerah menunjukkan seberapa lama daerah tersebut berdiri dan mempunyai struktur organisasi pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Setyaningrum dan Syafitri (2012) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara umur administratif pemerintah daerah dengan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian tentang pengaruh umur administratif pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* belum ditemukan. Namun penelitian tentang umur terhadap pengungkapan pada perusahaan telah banyak dilakukan diantaranya penelitian Yusuf (2011) dan Oktavianti (2014). Perusahaan dan pemerintah daerah dapat disamakan dalam hal kedua entitas tersebut merupakan sebuah organisasi dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain adalah prinsipal.

Sejalan dengan teori sinyal, informasi yang disampaikan pemerintah daerah yang lebih tua menjadi sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah yang lebih lama berdiri melakukan kegiatan pemerintahan dan proses administrasi yang lebih banyak sehingga informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan yang harus

disampaikan lebih banyak. Pada penelitian Yusuf (2011) diperoleh bukti bahwa umur berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan pada penelitian Oktavianti (2014) umur berpengaruh signifikan negatif pada pengungkapan dengan alasan adanya kecenderungan bagi perusahaan baru untuk menampilkan citra terbaik sehingga perusahaan yang baru berdiri cenderung mengungkapkan lebih banyak pengungkapan.

Jika ditelaah lebih lanjut maka pemerintah daerah yang telah lama berdiri memiliki pengalaman lebih banyak dan kemampuan dalam pengelolaan infrastruktur serta keuangan daerah yang lebih stabil untuk mengembangkan pemanfaatan internet. Hal ini akan mempengaruhi jumlah dan kualitas informasi yang diungkapkan pada *website* pemerintah daerah.

Sejalan dengan teori agensi, Hendriyani dan Tahar (2015) menyebutkan agen dituntut untuk menyediakan informasi bagi prinsipal menjadi dorongan bagi pemerintah daerah menyediakan informasi bagi masyarakat. Hal ini ditujukan untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Informasi keuangan dan non keuangan yang dimiliki oleh daerah yang semakin tua umurnya juga semakin banyak sehingga diharapkan semakin lama umur administratif daerah maka semakin banyak informasi yang diungkapkan. Semakin lama umur administratif pemerintah daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin banyak sehingga diharapkan mampu melakukan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik yang semakin besar. Dari penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis:

H₁ : Umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah

H₂ : Umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah

2.3.3 *Leverage* terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di *website* pemerintah daerah

Hubungan keagenan yang terjadi antara kreditur dan pemerintah daerah dapat mendorong terjadinya peningkatan jumlah pengungkapan informasi pada *website* pemerintah daerah. Rahman *et al* (2013) menjelaskan *leverage* merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah aset yang dimiliki. Pemerintah daerah dengan *leverage* tinggi mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasi lebih banyak khususnya informasi keuangan untuk meyakinkan kreditur bahwa pemerintah daerah mempunyai aset yang cukup untuk menjamin kewajiban. Daerah dengan *leverage* tinggi menanggung biaya keagenan yang besar karena besarnya pengawasan yang dilakukan kreditur (Laswad *et al*, 2005).

Semakin besar *leverage* maka semakin besar juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman. Hal tersebut menjadi dorongan kepada pemerintah daerah untuk memberikan informasi lebih banyak kepada pihak yang memberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi asimetri informasi. Kebutuhan dana penyediaan informasi untuk memenuhi

pengawasan pihak pemberi pinjaman sangat besar. Internet merupakan media efektif untuk mengurangi kebutuhan dana yang besar.

Dikaitkan dengan teori sinyal, daerah yang memiliki jumlah kewajiban yang besar dituntut untuk menyediakan informasi yang besar pula sebagai sinyal transparansi dan akuntabilitas kepada kreditur. Trisnawati dan Ahmad (2014) menyebutkan kreditor akan mengawasi penggunaan dana yang dipinjamkan dan menilai kemampuan pemda dalam melunasi kewajibannya. Pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada daerah dengan *leverage* tinggi dapat menjadi sinyal bahwa daerah tersebut dapat menjamin pinjamannya dengan aset yang ada.

Laswad *et al* (2005); Styles dan Tennyson (2007); Rahman *et al* (2013); Trisnawati dan Ahmad (2014); Caba-Perez *et al* (2014) menemukan bukti bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website*. Ingram (1984) menyebutkan adanya dorongan yang besar untuk memonitor keuangan pemerintah dan mengurangi tingkat hutang berhubungan dengan tingkat pengungkapan informasi akuntansi yang lebih besar. Beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil berlawanan. Pada penelitian Araujo dan Romero (2012) tidak ditemukan pengaruh antara tingkat hutang dan transparansi informasi dari pemerintah. Giroux dan McLelland (2003) juga tidak menemukan hubungan signifikan antara tingkat hutang dan tingkat pengungkapan.

Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyebutkan dengan menggunakan media *website* pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi cara efektif mengurangi kebutuhan dana yang besar untuk pengawasan. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi di *website* pemerintah daerah dikarenakan adanya tuntutan yang semakin tinggi untuk memberikan informasi kepada pihak yang memberikan pinjaman. Dari penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah

H₄: *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah

2.3.4 Ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di *website* pemerintah daerah

Ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah lain dapat menjelaskan kondisi keuangan daerah (Styles dan Tennyson 2007). Sejalan dengan teori sinyal, ketergantungan daerah yang tinggi memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa daerah tersebut masih memerlukan banyak bantuan keuangan dari daerah lain.

Hubungan keagenan terjadi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pandansari (2016) mengatakan bahwa hubungan positif ketergantungan daerah dan tingkat pengungkapan disebabkan pemerintah pusat ingin memantau apa yang dilakukan pemerintah daerah dan tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana yang telah diberikan pemerintah pusat. Giroux dan McLelland (2003) meneliti

bentuk pemerintahan kota di Amerika pada tahun 1983 dan 1996, terjadi penurunan *intergovernmental grant* pada semua kota dan terjadi peningkatan dalam tingkat pengungkapan akuntansi. Namun penelitian Giroux dan McLelland (2003) tersebut menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara *intergovernmental grant* dan tingkat pengungkapan informasi akuntansi pada kota-kota di Amerika. Ingram (1984) menyebutkan bahwa adanya ketergantungan keuangan yang besar antar pemerintah pusat dan lokal akan menyebabkan peningkatan pengungkapan informasi oleh pemerintah lokal untuk memudahkan pemerintah pusat mengontrol dan memonitor. Semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah lain menyebabkan pemerintah daerah terdorong untuk mengungkapkan informasi semakin banyak agar tidak terjadi asimetri informasi.

Martani dan Liestiani (2012) mengatakan bahwa semakin besar ketergantungan, maka semakin tinggi pula tekanan untuk mematuhi peraturan. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah di *website* pemerintah daerah menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah dengan ketergantungan tinggi untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan. Ingram (1984) dan Robbin dan Austin(1986) menemukan hubungan yang positif signifikan antara ketergantungan daerah dan tingkat pengungkapan.

Martani dan Liestiani (2012) menemukan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan. Hal ini dikarenakan dana perimbangan ditransfer tanpa memperhatikan laporan kepatuan sehingga pemerintah daerah tidak termotivasi melakukan pengungkapan. Hendriyani dan

Tahar (2015) juga menemukan hubungan negatif signifikan antara tingkat ketergantungan dan pengungkapan karena pemerintah daerah cenderung hanya mengejar opini wajar tanpa memperhatikan kualitas pengungkapan.

Adanya ketergantungan pemerintah daerah yang besar kepada pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah pusat harus mendapatkan informasi dari daerah untuk keperluan pengawasan. Selain itu adanya dorongan untuk mengontrol dan memonitor daerah dari pusat mengakibatkan daerah harus mengungkapkan informasi yang diminta dari pusat. Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyebutkan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terlihat dengan adanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengawasi keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengawasi keuangan eksternal. Dari penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₅: Ketergantungan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah
- H₆: Ketergantungan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota di Indonesia yang mempunyai alamat *website* resmi. Sampel untuk model I dengan variabel terikat tingkat pengungkapan informasi keuangan adalah 128 dan sampel model II dengan variabel terikat tingkat pengungkapan informasi non keuangan adalah 360. Teknik pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Model I kriterianya adalah: *website* resmi pemerintah daerah bisa diakses, minimal menampilkan satu fitur pengungkapan informasi keuangan, dan ketersediaan data pendukung bisa diperoleh.
2. Model II kriterianya adalah: *website* resmi pemerintah daerah bisa diakses, minimal menampilkan satu fitur pengungkapan informasi non keuangan, dan ketersediaan data pendukung bisa diperoleh.

Tabel 3.1
Penentuan Sampel Penelitian

Uraian	Jumlah
a. Model I	
➤ Jumlah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota	491
➤ Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai <i>website</i> resmi	(12)
➤ <i>Website</i> yang tidak bisa diakses	(105)
➤ <i>Website</i> yang tidak menampilkan informasi keuangan	(172)
➤ Ketersediaan data pendukung tidak lengkap	(7)
➤ Data daerah menjadi <i>outlier</i> dan dikeluarkan dari sampel	(8)
➤ Jumlah frekuensi nilai ekstrim tinggi dan rendah untuk indeks pengungkapan informasi keuangan sangat besar dan mengganggu distribusi normal data sehingga dikeluarkan dari sampel	(59)
➤ Jumlah Sampel Model I	128

Tabel 3.1 Lanjutan

b. Model II	
➤ Jumlah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota	491
➤ Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai <i>website</i> resmi	(12)
➤ Website yang tidak bisa diakses dan tidak menampilkan informasi non keuangan	(120)
➤ Jumlah Sampel Model II	360

Sumber: Data Diolah, 2017

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Tipe Data Penelitian

Tipe data dalam penelitian ini adalah *cross-section*. Gujarati (2010) menjelaskan bahwa data *cross-section* adalah data yang terdiri dari atas satu atau lebih variabel yang dikumpulkan dalam satu periode yang sama.

3.2.2 Sumber Data

Data penelitian menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah pengamatan langsung pada *website* pemerintah daerah untuk memeriksa keberadaan fitur yang telah dijadikan operasional variabel untuk mencari indeks informasi keuangan dan non keuangan. Pengamatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017. Sedangkan data sekunder yaitu:

a. alamat situs resmi pemerintah daerah diperoleh dari:

<http://www.kemendagri.go.id/basis-data/2013/05/06/alamat-situs-daerah-dan-lpse>

b. data laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari realisasi anggaran (data dana perimbangan dan total pendapatan) dan neraca (data total aset dan total

kewajiban) diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Badan Pemeriksa Keuangan.

- c. data tahun pembentukan daerah diperoleh dari undang-undang pembentukan daerah yang disebutkan Wikipedia dengan sumber BPS yang diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia

3.3 Definisi operasional variabel penelitian

3.3.1 Variabel terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan.

3.3.1.1 Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan

Pengukuran variabel dilakukan dengan indeks pengungkapan yang dikembangkan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 dan kemudian diperjelas lagi dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015. Indeks merupakan jumlah skor secara keseluruhan dibagi nilai maksimal yaitu 12. Indeks diberi nilai antara 0 sampai dengan 1.

Tabel 3.2
Indeks Pengungkapan Informasi Keuangan

No	Informasi	Skoring
1	Ringkasan RKA SKPD	1
2	Ringkasan RKA PPKD	1
3	Rancangan Perda APBD	1
4	Rancangan Perda Perubahan APBD	1
5	Perda APBD	1
6	Perda Perubahan APBD	1
7	Ringkasan DPA SKPD	1
8	Ringkasan DPA PPKD	1
9	LRA SKPD	1
10	LRA PPKD	1

Tabel 3.2 lanjutan

11	LKPD yang Telah Diaudit	1
12	Opini BPK atas LKPD	1
	TOTAL	12

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012

3.3.1.2 Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan

Untuk variabel tingkat pengungkapan informasi non keuangan diadopsi sesuai dengan penelitian Hermana, dkk (2012) dan Sofia dan Husen (2013) yang dikembangkan dari panduan pembangunan situs web pemerintah daerah peserta *Urban Sector Development Reform Project* (Edisi April 2010). Indeks pengungkapan informasi non keuangan didapatkan dari pembagian jumlah skor dengan nilai maksimal yaitu 18, sehingga indeks berada diantara nilai 0 dan 1.

Tabel 3.3
Indeks Pengungkapan Informasi Non Keuangan

No	Informasi	Skoring
1	News	1
2	Kontak Pemda	1
3	Buku tamu	1
4	Kegiatan Pemda	1
5	Visi	1
6	Misi	1
7	Profil	1
8	Sejarah	1
9	Struktur	1
10	Promosi	1
11	FAQ	1
12	<i>E-procurement</i>	1
13	Fasilitas pencarian	1
14	Tautan link	1
15	Peta daerah	1
16	Site map	1

Tabel 3.4 lanjutan

17	Forum	1
18	Pooling	1
	Total	17

Sumber: Sofia dan Husen (2013)

3.3.2 Variabel bebas

3.3.2.1 Umur administratif pemerintah daerah

Untuk menghitung umur administratif pemerintah daerah menggunakan cara pengukuran sama dengan yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) yaitu dengan cara mengurangi tahun penelitian dengan tahun pembentukan masing-masing pemerintah daerah berdasarkan undang-undang.

3.3.2.3 *Leverage*

Rahman *et al* (2013) menyebutkan bahwa *leverage* merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jumlah hutang disini adalah jumlah hutang jangka panjang dan jangka pendek. Penghitungan *leverage* disini merujuk pada penelitian Laswad *et al* (2005) dan Rahman *et al* (2013) yaitu total kewajiban dibagi total aset.

3.3.2.4 Ketergantungan daerah

Ingram (1984) menggunakan ukuran *intergovernmental revenue per total revenue* untuk menghitung ketergantungan daerah. Penelitian ini mengacu pada pengukuran ketergantungan daerah yang digunakan Pandansari (2016) dengan menggunakan ukuran total dana perimbangan dibagi total pendapatan.

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Operasional
1	Tingkat pengungkapan informasi keuangan	Indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan
2	Tingkat pengungkapan informasi non keuangan	Indeks tingkat pengungkapan informasi non keuangan
3	Umur administratif Pemerintah Daerah	Tahun penelitian dikurangi tahun pembentukan Pemerintah Daerah berdasar Undang-undang
4	<i>Leverage</i>	perbandingan total kewajiban/ total asset
5	Ketergantungan daerah	Total dana perimbangan/ total pendapatan

3.4 Model analisis

Model analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah regresi berganda. Model regresi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur administratif pemerintah daerah, *leverage* dan ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah dengan menggunakan *t test* dan *F test*. Model regresinya adalah sebagai berikut:

Model I untuk variabel terikat tingkat pengungkapan informasi keuangan

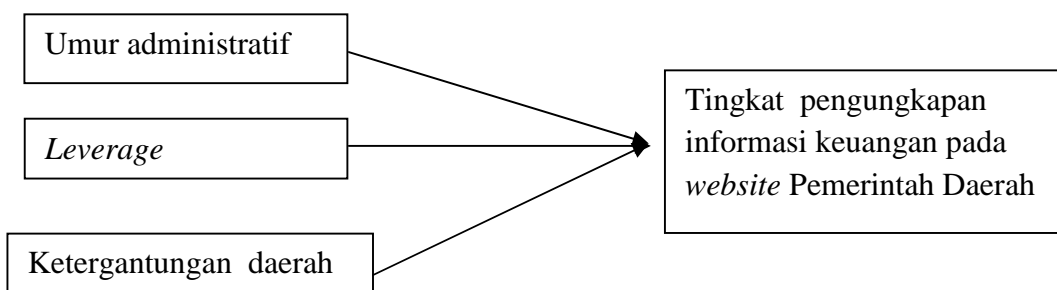
$$\text{DISC_FIN} = + 1 \text{ AGE} + 2 \text{ LEV} + 3 \text{ DEP} +$$

Model II untuk variabel terikat tingkat pengungkapan informasi non keuangan

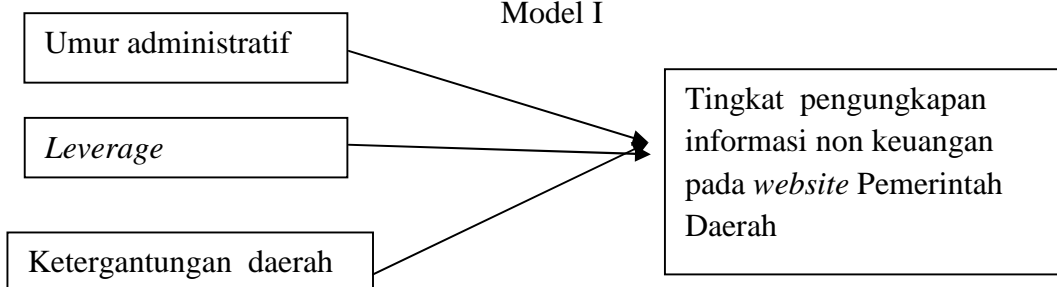
$$\text{DISC_NONFIN} = + 1 \text{ AGE} + 2 \text{ LEV} + 3 \text{ DEP} +$$

Keterangan :

DISC_FIN	= Tingkat pengungkapan informasi keuangan
DISC_NONFIN	= Tingkat pengungkapan informasi non keuangan
	= konstanta
AGE	= Umur administratif pemerintah daerah
LEV	= <i>Leverage</i>
DEP	= Ketergantungan daerah
1- 3	= Koefisien
	= Koefisien eror



Gambar 3.1
Model I



Gambar 3.2
Model II

3.5 Metode Analisis dan alat analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Dalam Gujarati (2015) disebutkan bahwa metode OLS adalah metode kuadrat terkecil memiliki sifat-sifat statistik yang sangat menarik dan telah membuat metode ini sebagai salah satu metode paling kuat dan dikenal dalam analisis regresi. Sebelum menggunakan OLS akan dilakukan uji statistik deskriptif

dan uji asumsi klasik untuk membuktikan bahwa pemilihan estimator adalah terbaik, linear dan tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator*-BLUE). Alat analisis pengolahan data yang digunakan adalah SPSS 18.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara berkelompok (Riduwan dan Akdon, 2014). Tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti. Dalam penelitian ini analisis deskriptif dijelaskan dengan menampilkan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada Analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas diukur dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Aturan pengambilan keputusan yang dipakai adalah:

- a. Apabila nilai signifikansi Kolmogorow-smirnov atau nilai asymp. Sig. (2-tailed) dibawah 0.05 maka H_0 ditolak berarti residual tidak terdistribusi normal
- b. Apabila nilai signifikansi Kolmogorow-smirnov atau nilai asymp. Sig. (2-tailed) diatas 0.05 maka H_0 diterima berarti residual terdistribusi normal

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

H_1 : Data mengandung masalah heteroskedastisitas

Aturan pengambilan keputusan pada dengan menggunakan kriteria yaitu:

- a. apabila nilai Sig. > 0,05 maka H_0 diterima kesimpulannya tidak terdapat heteroskedastisitas.
- b. apabila nilai Sig. < 0,05 maka H_0 ditolak kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji ini untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Metode untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Aturan pengambilan keputusan mengacu pada Gujarati (2010) yaitu jika nilai VIF suatu variabel melebihi 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan metode Durbin Watson dengan aturan apabila nilai d berada di antara d_U dan $(4-d_U)$ maka tidak ada autokorelasi.

3.5.3 Uji Koefisien Determinasi Majemuk R^2

Uji koefisien determinasi majemuk dilambangkan dengan R^2 digunakan untuk mengetahui proporsi dari total variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X secara bersama-sama (Gujarati, 2015). Gujarati (2015) lebih lanjut menjelaskan, Nilai R^2 terletak diantara 0 dan 1. Jika bernilai 1, garis regresi dapat menjelaskan 100% variasi pada variabel Y . Di sisi lain, jika bernilai 0, model regresi tidak dapat menjelaskan variasi sedikitpun pada variabel Y .

3.5.4 Uji Kelayakan Model (*F-test*)

Uji kelayakan model atau uji F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak di sini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (α) yang telah ditentukan maka dapat dikatakan bahwa model regresi linier yang ditentukan layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.5 Uji Signifikansi Individual (*t-test*)

Tujuan dari uji signifikansi individual adalah untuk melihat apakah suatu parameter regresi telah sesuai dengan hipotesis. Statistik uji yang digunakan adalah t test. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai prob. t hitung di bawah tingkat signifikansi disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Sampel model I adalah 128 daerah dan sampel Model II adalah 360 daerah (Penentuan sampel penelitian dijelaskan pada tabel 3.1). Periode pengamatan dilakukan pada Januari sampai dengan Juni tahun 2017 terhadap *website* resmi Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Dari perbandingan jumlah sampel model I dan II ditemukan bukti bahwa tingkat pengungkapan informasi non keuangan lebih tinggi daripada pengungkapan informasi keuangan. Sejalan dengan penelitian Sofia dan Husen (2013) yang menyebutkan ada perbedaan tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah di Indonesia, keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam menampilkan informasi di websitenya.

Salah satu tujuan pengungkapan informasi keuangan melalui media *website* adalah memperkuat transparansi pengelolaan anggaran dalam rangka mencegah korupsi. Pemerintah daerah lebih cenderung menampilkan informasi yang aman dari sorotan media yaitu informasi non keuangan. Pengungkapan informasi keuangan merupakan pengungkapan yang diinstruksikan presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua daerah tingkat kabupaten/kota di Indonesia melakukan pengungkapan informasi keuangan.

Berdasar tabel 4.1 diperlihatkan bahwa daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua dan Papua Barat tidak ada yang menampilkan informasi keuangan. Namun, dalam laporan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (2016) disebutkan bahwa daerah tingkat provinsi untuk wilayah Lampung, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Papua masuk dalam daftar daerah yang telah berhasil mengungkapkan informasi keuangan capaian B12 sesuai Instruksi Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan untuk tingkat pengungkapan pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hermana dan Silfianti (2011) yang menyebutkan bahwa tingkat pengungkapan informasi lebih banyak dilakukan di level propinsi daripada level kabupaten/kota.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Pulau Sumatera dan Jawa lebih banyak melakukan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan bila dibandingkan dengan daerah lainnya (Tabel 4.1). Kesenjangan penerapan e-Government di Indonesia terjadi karena tidak meratanya penyebaran infrastruktur dan sumber daya (Sofia dan Husen, 2013).

Tabel 4.1
Jumlah sampel Kabupaten/kota Per propinsi di Indonesia

No	Nama Provinsi	Sampel Model I	Sampel Model II
1	Provinsi Aceh	8	15
2	Provinsi Sumatera Utara	6	29
3	Provinsi Sumatera Barat	7	12
4	Provinsi Riau	5	8
5	Provinsi Kepulauan Riau	2	4
6	Provinsi Jambi	6	9
7	Provinsi Sumatera Selatan	5	13

Tabel 4.1 Lanjutan

8	Provinsi Bangka Belitung	1	6
9	Provinsi Bengkulu	1	7
10	Provinsi Lampung	0	10
11	Provinsi Jawa Barat	7	22
12	Provinsi Banten	2	6
13	Provinsi Jawa Tengah	18	31
14	Provinsi Yogyakarta	3	5
15	Provinsi Jawa Timur	14	34
16	Provinsi Kalimantan Barat	5	12
17	Provinsi Kalimantan Tengah	3	12
18	Provinsi Kalimantan Selatan	1	15
19	Provinsi Kalimantan Timur	6	9
20	Provinsi Sulawesi Utara	0	9
21	Provinsi Gorontalo	0	2
22	Provinsi Sulawesi Tengah	2	2
23	Provinsi Sulawesi Selatan	7	19
24	Provinsi Sulawesi Barat	1	1
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	3
26	Provinsi Bali	6	8
27	Provinsi NTB	7	10
28	Provinsi NTT	1	13
29	Provinsi Maluku	2	8
30	Provinsi Maluku Utara	1	4
31	Papua	0	17
32	Papua Barat	0	5
		128	360

Sumber: Data Diolah, 2017

4.2 Statistik Deskriptif

4.2.1 Statistik Deskriptif Model I

Pengukuran tingkat pengungkapan informasi keuangan dilakukan dengan indeks pengungkapan yang dikembangkan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 dan kemudian diperjelas lagi dalam Instruksi

Presiden Nomor 7 tahun 2015. Daftar informasi keuangan yang tertampil di *website* pemerintah daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 yaitu: Ringkasan RKA SKPD; Ringkasan RKA PPKD; Raperda APBD; Raperda Perubahan APBD; Perda APBD; Perda Perubahan APBD; Ringkasan DPA SKPD; Ringkasan DPA PPKD; LRA seluruh SKPD; LRA PPKD; LKPD Yang Sudah Di Audit; Opini atas LKPD.

Tabel 4.2
Deskriptif Statistik Model I

	Sampel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DISC_FIN	128	0.1667	0.9167	0.5390	0.2356
AGE	128	9.0000	67.0000	48.9531	21.9002
DEP	128	0.3962	0.8970	0.6507	0.1008
LN (LEV)	128	0.0001	0.0766	0.0136	0.01486

Sumber: Data Diolah, 2017

Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks pengungkapan informasi keuangan tertinggi adalah 0.9167, terendah adalah 0.1667, rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan adalah 0,5390. Standar deviasi untuk variabel indeks pengungkapan informasi keuangan adalah 0.2356. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah masih tergolong rendah. Pemerintah daerah yang mempunyai *website* resmi belum sepenuhnya menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015. Tingkat pengungkapan yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mematuhi pemerintah pusat dalam kewajibannya menampilkan informasi keuangan.

Tabel 4.3
Frekuensi Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan

No	Item Informasi	Frekuensi	Persentase	Kumulatif
1	2	12	9.4	9.4
2	3	14	10.9	10.9
3	4	7	5.5	5.5
4	5	19	14.8	14.8
5	6	15	11.7	11.7
6	7	15	11.7	11.7
7	8	9	7.0	7.0
8	9	9	7.0	7.0
9	10	17	13.3	13.3
10	11	11	8.6	8.6
	Total	128	100.0	100.0

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasar hasil penelitian dapat diketahui bahwa belum semua *website* pemerintah daerah menampilkan jumlah informasi keuangan sesuai dengan Instruksi Presiden. Sebaran jumlah jenis informasi yang diungkapkan masih bervariasi yaitu masih terdapat daerah yang hanya mengungkapkan sedikit informasi keuangan dan ada daerah yang banyak mengungkapkan informasi keuangan.

Tabel 4.4
Jumlah *Website* Pemerintah Daerah Berdasar
Jenis Informasi Dalam Indeks Pengungkapan Informasi Keuangan

No	Jenis Item	Jumlah <i>Website</i>	Persentase
1	Ringkasan RKA SKPD	91	71.09%
2	Ringkasan RKA PPKD	65	50.78%
3	Rancangan Perda APBD	64	50.00%
4	Rancangan Perda Perubahan APBD	45	35.16%
5	Perda APBD	105	82.03%
6	Perda Perubahan APBD	57	44.53%

Tabel 4.4 lanjutan

7	Ringkasan DPA SKPD	94	73.44%
8	Ringkasan DPA PPKD	59	46.09%
9	LRA SKPD	81	63.28%
10	LRA PPKD	54	42.19%
11	LKPD yang telah diaudit	53	41.41%
12	Opini BPK	59	46.09%

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil penelitian *website* pemerintah daerah yang menampilkan informasi keuangan sebagian besar menampilkan jenis informasi Perda APBD yaitu sebanyak 82.05%. Jenis informasi keuangan yang paling sedikit ditampilkan adalah Rancangan Perda Perubahan APBD yaitu sebanyak 35.16%.

4.2.2 Statistik Deskriptif Model II

Tabel 4.5
Deskriptif statistik Model II

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INDEKS_NONKEU	360	,1667	,8889	,600309	,1334799
UMUR_PEMDA	360	9,0000	67,0000	42,680556	23,7229990
KETERGANTUNGAN	360	,2719	,9803	,684792	,1157523
LEVERAGE	360	,0000	,2425	,014037	,0212711
Valid N (listwise)	360				

Sumber: data diolah, 2017

Hasil penelitian pada tabel 4.5 menunjukkan pada model II terdapat sampel penelitian sebanyak 360 daerah dengan indeks tingkat pengungkapan informasi

non keuangan tertinggi adalah 0.8889 dan terendah adalah 0.1667. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi non keuangan adalah 0,6003. Standar deviasi untuk nilai indeks pengungkapan informasi non keuangan adalah 0.1334. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada *website* pemerintah daerah masih tergolong rendah. Masih rendahnya tingkat pengungkapan informasi non keuangan dikarenakan kurangnya kesadaran pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi, tidak adanya pendampingan yang dilakukan pemerintah pusat, dan tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak mengungkapkan informasi non keuangan pada websitenya.

Nilai tertinggi umur pemerintah daerah adalah 67 tahun dan nilai terendah adalah 9 tahun. Nilai rata-rata umur pemerintah daerah adalah 42 tahun dengan standar deviasi 23,72. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia telah lama berdiri dan disahkan dengan undang-undang.

Nilai tertinggi *leverage* adalah 0.2425 dan nilai terendah sebesar 0.0000. Nilai rata-rata *leverage* pemerintah daerah adalah 0,0140 dengan standar deviasi 0,0212. Hal ini menunjukkan rasio kewajiban terhadap total aset yang dimiliki pemerintah daerah tergolong rendah. Rendahnya kewajiban yang ditanggung masing-masing pemerintah daerah karena adanya rencana kerja anggaran sehingga anggaran atau pengeluaran sudah direncanakan dengan baik. Pembiayaan untuk pengeluaran pemerintah daerah juga telah direncanakan dengan baik sehingga banyak pemerintah daerah yang tidak mempunyai hutang/kewajiban besar. Daerah yang mempunyai nilai *leverage* paling tinggi

adalah Kabupaten Yahukimo dan yang mempunyai nilai *leverage* paling rendah adalah Kabupaten Jayawijaya yaitu sebesar 0,00002.

Nilai tertinggi ketergantungan daerah adalah 0.9803 dan nilai terendah sebesar 0.2719. Nilai rata-rata ketergantungan daerah adalah 0,6847 dengan standar deviasi 0,1157. Rata-rata nilai ketergantungan daerah tergolong tinggi dan mengindikasikan bahwa daerah sangat bergantung dengan dana bantuan dari pemerintah pusat. Persebaran sumber daya alam yang tidak merata dan adanya perbedaan ekonomi masing-masing daerah menjadikan ketergantungan daerah di Indonesia sangat beragam. Daerah dengan nilai ketergantungan tertinggi yaitu Kabupaten Buru di Provinsi Maluku. Daerah dengan nilai ketergantungan terendah adalah Kota Tangerang Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki sumber pendapatan daerah yang besar selain dari dana perimbangan. Sumber pendapatan tersebut adalah berasal dari pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak daerah.

Tabel 4.6
Frekuensi Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan

No	Jumlah Item Informasi	Frekuensi	Persentase
1	3	1	0,3
2	4	4	1,1
3	5	5	1,4
4	6	3	0,8
5	7	19	5,3
6	8	23	6,4
7	9	48	13,3
8	10	54	15
9	11	58	16,1
10	12	53	14,7

Tabel 4.6 Lanjutan

11	13	45	12,5
12	14	27	7,5
13	15	18	5
14	16	2	0,6
	Total	360	100

Sumber: Data Diolah, 2017

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis item informasi non keuangan yang ditampilkan paling sedikit adalah sebanyak tiga item informasi dan paling banyak enam belas item. Daerah yang menampilkan jumlah item informasi non keuangan paling sedikit adalah Kabupaten Kayong Utara sedangkan daerah yang menampilkan item informasi paling banyak adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sukamara. Hal ini menunjukkan belum terdapat daerah yang secara lengkap menampilkan item informasi non keuangan dikarenakan beberapa keterbatasan yang dimiliki daerah tersebut.

Keterbatasan tersebut misalnya lemahnya sumber daya manusia, terbatasnya teknologi yang ada, kurangnya pengaruh pimpinan, atau belum maksimalnya kerjasama antar satuan kerja perangkat daerah di pemerintah daerah tersebut. Sebagai contoh, tampilan informasi peta daerah memerlukan gambar peta daerah yang bisa didapatkan dari Badan Perencanaan Daerah. Tingkat kesulitan untuk menampilkan jenis item informasi non keuangan tertentu dapat menjadi penyebab masih rendahnya jumlah item informasi yang ditampilkan.

Tabel 4.7
Jenis Informasi yang ditampilkan

No	Jenis Informasi	Jumlah Website	Persentase terhadap Keseluruhan Website
1	<i>News</i>	356	99%
2	Kontak Pemda	288	80%
3	Buku Tamu	136	38%
4	Kegiatan Pemda	158	44%
5	Visi	314	87%
6	Misi	314	87%
7	Profil	336	93%
8	Sejarah	290	81%
9	Struktur	279	78%
10	Promosi	239	66%
11	<i>FAQ</i>	3	1%
12	<i>e-Procurement</i>	283	79%
13	Fasilitas Pencarian	258	72%
14	Tautan Link	308	86%
15	<i>Sitemap</i>	44	12%
16	Forum	15	4%
17	Peta daerah	199	55%
18	<i>Polling</i>	70	19%

Sumber: Data Diolah, 2017

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 99% atau hampir seluruh *website* pemerintah daerah yang menjadi sampel menampilkan jenis informasi *news* atau berita. Jenis berita yang ditampilkan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat. Jenis informasi non keuangan selanjutnya yang paling sering ditampilkan adalah profil, visi dan misi daerah serta tautan link.

Sebanyak 93% *website* yang menjadi sampel menampilkan profil daerah masing-masing yang berisi visi dan misi daerah dan bahkan di beberapa *website* ditemukan profil daerah diisi dengan sejarah daerah. Jenis informasi yang paling sedikit ditampilkan adalah FAQ dan Forum. FAQ dan forum paling sedikit ditemukan karena pada *website* pemerintah daerah juga tersedia buku tamu, dimana masyarakat dan pengguna lainnya mengajukan pertanyaan, saran dan pendapat melalui pilihan buku tamu tersebut.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diukur dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Apabila nilai signifikansi Kolmogorow-smirnov atau nilai asymp. Sig. (2-tailed) diatas 0.05 berarti residual terdistribusi normal. Pada uji normalitas dilakukan transformasi untuk variabel *leverage* pada model I menjadi logaritma natural *leverage*. Hal ini dikarenakan hasil uji normalitas pada variabel *leverage* model I tidak menunjukkan normalitas data, sedangkan setelah dibentuk dalam logaritma natural menunjukkan normalitas data.

Untuk variabel umur daerah tidak dilakukan perubahan dalam bentuk apapun meskipun variabel data umur daerah menunjukkan ketidaknormalan data. Ketidaknormalan ditunjukkan dengan banyaknya frekuensi daerah dengan umur yang lama dibandingkan daerah yang baru berdiri. Hal ini merupakan sesuatu yang unik dan tetap dimasukkan dalam analisa karena memang fakta yang ada menunjukkan sebagian besar daerah di Indonesia adalah daerah yang telah lama

berdiri. Meskipun tidak dilakukan perubahan data atau transformasi untuk variabel umur daerah, secara keseluruhan variabel ini tidak mengganggu terbentuknya residual yang terdistribusi normal.

Tabel 4.8
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Model I dan II

No	Uraian	Nilai Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
1	Model I	1.266	0.081
2	Model II	0.667	0.765

Sumber: Data Diolah, 2017

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0.081 pada model I dan 0.765 pada model II. Hal ini menunjukkan kedua nilai tersebut di atas 0.05 dan kesimpulannya residual data terdistribusi normal pada model I dan II.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Metode untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Aturan pengambilan keputusan mengacu pada Gujarati (2010) yaitu jika nilai VIF suatu variabel melebihi 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas Model I dan II

No	Uraian	Collinearity statistics	
		Tolerance	VIF
1	Model I		
	AGE	0.840	1.190
	LN(LEV)	0.981	1.020
	DEP	0.839	1.191
2	Model II		
	AGE	0.750	1.334
	LEV	0.983	1.017
	DEP	0.755	1.325

Sumber: Data Diolah, 2017

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai VIF untuk model I variabel AGE, DEP dan LN(LEV) adalah 1.190, 1.191 dan 1.020. Nilai VIF untuk variabel AGE, LEV dan DEP pada model II adalah 1.334, 1.017 dan 1.325. Keseluruhan nilai VIF dibawah 10 sehingga kesimpulannya tidak ditemukan persoalan multikolinearitas pada model I dan II.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau disebut homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser dengan kriteria yaitu apabila nilai $\text{Sig.} > 0,05$ maka kesimpulannya tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4.10
Hasil Uji Glejser Model I dan II

No	Uraian	T	Sig.
1	Model I		
	AGE	0.493	0.623
	LN(LEV)	0.092	0.927
	DEP	-0.047	0.963
2	Model II		
	AGE	0,198	0,843
	LEV	-1,867	0,063
	DEP	0,886	0,376

Sumber: Data Diolah, 2017

Nilai sig. untuk variabel AGE, DEP dan LN (LEV) pada model I adalah 0.623, 0.963 dan 0.927. Nilai sig. untuk variabel AGE, LEV dan DEP pada model II adalah 0.843, 0.063 dan 0.376 . Keseluruhan nilai sig. lebih besar dari 0.05 sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model I dan II.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan metode Durbin Watson dengan aturan apabila nilai d berada di antara dU dan (4-dU) maka tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.11
Nilai Durbin Watson Model I dan II

No	Uraian	Nilai DW	dU	4-Du
1	Model I	2.045	1.759	2.241
2	Model II	1,893	1.838	2.162

Sampel: Data Diolah, 2017

Untuk model I dengan jumlah data= $n=128$ dan jumlah variabel independen= $k=3$ pada tabel DW dengan signifikansi 0.05 diperoleh nilai $dL=1.663$ dan $dU=1.759$. Perhitungan nilai $4-dU=2.241$. Nilai perhitungan Durbin Watson penelitian adalah 2.045 sehingga berada di antara dU dan $(4-dU)$.

Untuk model II dengan jumlah data= $n=360$ dan jumlah variabel independen= $k=3$ sehingga pada tabel DW dengan signifikansi 0.05 diperoleh nilai $dL=1.815$ dan $dU=1.838$. Perhitungan nilai $4-dU=2.162$. Nilai perhitungan Durbin Watson penelitian adalah 1.893 sehingga berada di antara dU dan $(4-dU)$. Kesimpulannya pada model I dan II tidak ada autokorelasi.

4.5 Pengujian Model Regresi

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi Majemuk R^2

Uji koefisien determinasi majemuk dilambangkan dengan R^2 digunakan untuk mengetahui proporsi dari total variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X secara bersama-sama (Gujarati, 2010).

Tabel 4.12
Koefisien determinasi majemuk

No	Uraian	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	Model I	.230 ^a	.053	.030	.2321421
2	Model II	.305 ^a	.093	.085	.1276534

sumber: Data Diolah, 2017

Nilai *adjusted* R^2 pada model I menunjukkan nilai 0.03 atau 3% artinya variabel independen umur pemerintah daerah, *leverage* dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah mampu menjelaskan varians dari variabel

tingkat pengungkapan informasi keuangan sebesar 3 %, sisanya sebesar 97% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai *adjusted R²* pada model II menunjukkan nilai 0.08 atau 8% artinya variabel independen umur pemerintah daerah, *leverage* dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah mampu menjelaskan varians dari variabel tingkat pengungkapan informasi non keuangan sebesar 8%, sisanya sebesar 92% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.5.2 Uji Kelayakan Model (*F-test*)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan layak atau tidak. Layak di sini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (α) yang telah ditentukan maka dapat dikatakan bahwa model regresi linier yang ditentukan layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13
Uji F Model I dan II

No	Uraian	F	Sig.
1	Model I	2,303	,080
2	Model II	12,173	,000

Sumber: Data Diolah, 2017

Tabel 4.13 menunjukkan nilai prob. F hitung model I adalah 0.080 dibawah taraf signifikansi 0.10 artinya model I layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh umur pemerintah daerah, *leverage* dan tingkat ketergantungan

pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

Tabel 4.13 menunjukkan nilai prob. F hitung model II adalah 0.000 dibawah taraf signifikansi 0.05 artinya model II layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh umur pemerintah daerah, *leverage* dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada *website* pemerintah daerah.

4.5.3 Uji Signifikansi Individual (*t-test*)

Tujuan dari uji signifikansi individual adalah untuk melihat apakah suatu parameter regresi telah sesuai dengan hipotesis. Statistik uji yang digunakan adalah t test. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai prob. t hitung di bawah tingkat signifikansi disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan pada variabel terikat. Apabila nilai prob. t hitung di atas tingkat signifikansi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.14
Hasil Uji t Model I

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.723	.188		3.842	.000
AGE	.001	.001	.050	.524	.601
LN(LEV)	-.018	.017	-.095	-1.074	.285
DEP	-.462	.223	-.197	-2.070	.041

Sumber: Data Diolah, 2017

Tabel 4.14 menunjukkan hasil analisa uji t pada model I menunjukkan variabel umur administratif pemerintah daerah dan *leverage* mempunyai nilai signifikansi 0.601 dan 0.285 atau berada di atas tingkat signifikansi 0.05 sehingga disimpulkan variabel umur administratif pemerintah daerah dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan. Sedangkan untuk variabel ketergantungan daerah mempunyai nilai signifikansi 0.041 atau di bawah 0.05 sehingga disimpulkan variabel ketergantungan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan.

Tabel 4.15
Hasil Uji t Model II

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,672	,055		12,295	,000
AGE	,001	,000	,189	3,237	,001
LEV	-,490	,319	-,078	-1,535	,126
DEP	-,161	,067	-,140	-2,405	,017

Sumber: Data Diolah, 2017

Tabel 4.16 menunjukkan hasil analisa uji t pada model II menunjukkan variabel umur administratif pemerintah daerah dan ketergantungan daerah mempunyai nilai signifikansi 0.001 dan 0.017 atau berada di bawah tingkat signifikansi 0.05 sehingga disimpulkan variabel umur administratif pemerintah daerah dan ketergantungan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan. Variabel *leverage* mempunyai nilai signifikansi 0.126 atau di atas 0.05 sehingga disimpulkan variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan.

Tabel 4.16
Ringkasan Hasil Uji T

No	Uraian	T	Sig.	Arti
1	Model I			
	AGE	.524	.601	Tidak signifikan
	LN(LEV)	-1.074	.285	Tidak signifikan
	DEP	-2.070	.041	Signifikan
2	Model II			
	AGE	3,237	0,001	Signifikan
	LEV	-1,535	0,126	Tidak signifikan
	DEP	-2,405	0,017	Signifikan

Sumber: data diolah, 2017

4.5.2.2 Model Regresi

Berdasar hasil uji t dapat diperoleh persamaan regresi untuk model I dan II sebagai berikut:

a. $DISC_FIN = 3.842 + 0.524 AGE - 1.074 LEV - 2.070 DEP$

b. $DISC_NONFIN = 12.295 + 3.237 AGE - 1.535 LEV - 2.405 DEP$

Keterangan :

DISC_FIN	= Tingkat pengungkapan informasi keuangan
DISC_NONFIN	= Tingkat pengungkapan informasi non keuangan
	= konstanta
AGE	= Umur administratif Pemerintah Daerah
LEV	= <i>Leverage</i>
DEP	= Ketergantungan daerah
1- 3	= Koefisien

Pada model persamaan 1, hasil analisis menunjukkan nilai koefisien dalam model regresi di atas sebesar: 0.524; -1.074; -2.070 dan nilai konstanta 3.842.

Dikarenakan tanda 1 positif, maka semakin besar umur administratif pemerintah daerah semakin besar juga tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah. Tanda 2 dan 3 negatif artinya semakin besar *leverage* dan

ketergantungan daerah maka semakin kecil tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah.

Pada model II hasil analisis menunjukkan nilai koefisien dalam model regresi di atas sebesar: 3.237; - 1.535; - 2.405 dan nilai konstanta 12.295. Tanda 1 positif, maka semakin besar umur administratif pemerintah daerah maka semakin besar juga tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah. Tanda 2 dan 3 negatif artinya semakin besar *leverage* dan ketergantungan daerah maka semakin kecil tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah

Tabel 4.16 menunjukkan pada model I dan II umur pemerintah daerah memiliki arah koefisien positif, tetapi nilai signifikansi t hitung pada model I sebesar 0.60 sedangkan pada model II sebesar 0.001. Hal ini berarti umur pemerintah daerah pada model I tidak berpengaruh signifikan sedangkan umur pemerintah daerah pada model II berpengaruh signifikan. H_1 yang menyatakan bahwa umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah tidak terdukung. H_2 yang menyatakan umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah terdukung.

Hasil penelitian berdasar tabel 4.16 umur pemerintah daerah pada model I dan II berarah positif. Artinya, umur pemerintah daerah yang semakin lama menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin matang secara kelembagaan dan teknis. Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyebutkan pemerintah daerah yang telah lama berdiri memiliki pengalaman lebih banyak dan kemampuan dalam pengelolaan infrastruktur serta keuangan daerah yang lebih stabil untuk mengembangkan pemanfaatan internet.

Sesuai dengan teori sinyal, umur pemerintah daerah adalah sinyal bahwa daerah tersebut telah lama berdiri dan disahkan dengan undang-undang. Kegiatan pemerintahan yang dilakukan daerah dengan umur lebih tua lebih banyak daripada daerah yang baru berdiri. Informasi keuangan dan non keuangan yang dimiliki daerah dengan umur lebih tua lebih banyak daripada daerah baru.

Hasil penelitian berdasar tabel 4.16 pengaruh umur pemerintah daerah pada model I dan II menunjukkan terjadinya hubungan keagenan. Hubungan keagenan yang terjadi di pemerintahan antara pemerintah dan rakyat membuat pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak daripada rakyat, terutama apabila pemerintahan tersebut telah berdiri lama. Hendriyani dan Tahar (2015) mengatakan pemerintah dapat mengambil kebijakan dan keputusan yang hanya menguntungkan pihak pemerintah saja dan mengorbankan kepentingan rakyat. Dengan semakin banyaknya pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang dilakukan pemerintahan dengan umur yang lebih tua, rakyat sebagai prinsipal dapat mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah

daerah dengan pengalaman lebih dalam pengungkapan akan lebih mengetahui informasi daerah yang dapat mengurangi asimetri informasi (Marwata, 2001).

Hasil penelitian berdasar tabel 4.16 tentang pengaruh umur pemerintah daerah pada model II sesuai dengan teori sinyal, informasi yang disampaikan pemerintah daerah yang lebih tua menjadi sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah yang lebih lama berdiri melakukan kegiatan pemerintahan dan proses administrasi yang lebih banyak sehingga informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan yang harus disampaikan lebih banyak. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah yang diberi amanah oleh rakyat berkeinginan memberikan sinyal kepada rakyat (Hendriyani dan Tahar, 2015). Yusuf (2011) mengatakan bahwa pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama akan memiliki pengalaman dan rekam jejak yang lebih banyak daripada pemerintah daerah yang baru berdiri sehingga informasi yang diungkapkan lebih besar. Hal ini mempengaruhi jumlah dan kualitas informasi yang diungkapkan pada *website* pemerintah daerah.

Hasil penelitian berdasar tabel 4.16 menunjukkan pengaruh umur daerah tidak signifikan pada model I dikarenakan beberapa sebab, yaitu:

- a. indeks pengungkapan informasi keuangan yang dipakai pada model tidak disusun berdasar jumlah tahun, sehingga tidak diperoleh data banyak sedikitnya jumlah pengungkapan informasi keuangan berdasar tahun terbentuknya daerah. Untuk informasi keuangan, setiap tahun anggaran baru pemerintah daerah diwajibkan membuat rencana kerja anggaran, peraturan

daerah tentang APBD, dokumen pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan serta dokumen penunjang lainnya. Secara administratif, umur daerah yang semakin tua memiliki catatan informasi keuangan yang lebih banyak berdasar tahun terbentuknya daerah.

- b. Pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah pertama kali diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2012 dan baru diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015. Hal ini menunjukkan semua daerah, baik yang berumur lama atau daerah baru, secara serempak memulai pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah pada waktu bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan informasi keuangan yang tertampil minimal tahun 2014 (data terlampir). Tidak ada *website* pemerintah daerah yang menampilkan informasi keuangan sebelum tahun anggaran 2014. Dengan demikian, tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh umur pemerintah daerah.
- c. Beberapa pemerintah daerah mungkin mengkhawatirkan masalah keamanan terhadap pengungkapan informasi keuangan. Informasi keuangan adalah informasi yang sensitif dan menjadi sorotan media. Dengan menggunakan media *website* pemerintah daerah, seluruh pengguna bisa mengakses informasi keuangan. Salah satu tujuan pengungkapan informasi keuangan adalah untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Oktavya (2015) menyebutkan salah satu aspek penting penunjang keberhasilan *e-Government* adalah keamanan. Kekhawatiran terhadap kondisi tidak aman akibat pengungkapan informasi keuangan dapat terjadi di semua daerah, baik daerah yang telah lama berdiri

atau daerah baru, sehingga daerah-daerah tertentu tanpa memandang umur daerahnya cenderung hanya mengungkapkan informasi keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah secara manual atau memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti BPK dan BPKP untuk keperluan pengawasan. Dengan demikian, umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah.

Pengaruh umur pemerintah daerah pada model II dibuktikan signifikan karena indeks pengungkapan informasi non keuangan disusun berdasar ketersediaan jumlah data. Data non keuangan yang ditampilkan seperti peta daerah, profil, visi dan misi daerah serta data non keuangan lainnya yang diungkapkan pada *website* pemerintah daerah tidak perlu dilakukan pembaruan data setiap tahun. Pembaruan data dilakukan terhadap item informasi non keuangan saat terjadi kejadian-kejadian penting tertentu misalnya terjadi pergantian kepala daerah atau terjadi pemekaran wilayah. Pemerintah daerah yang telah lama berdiri mempunyai pengalaman lebih dan mengetahui jenis informasi non keuangan yang dibutuhkan masyarakat sehingga pemerintah daerah yang telah lama berdiri lebih banyak mengungkapkan informasi non keuangan pada *website* pemerintah daerah.

Informasi non keuangan juga merupakan informasi yang tergolong aman dari sorotan media bahkan dapat menjadi nilai positif untuk pemerintah daerah. Dengan menampilkan informasi non keuangan seperti obyek wisata dapat menjadi alat promosi daerah dan menarik investor. Pemerintah daerah yang telah berdiri

lama tentunya telah mengenali nilai positif daerahnya masing-masing sehingga mengungkapkan informasi terbaiknya.

Hasil penelitian pengaruh umur pemerintah daerah pada model I bertolak belakang dengan penelitian Yusuf (2011), Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Oktavianti (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara umur dengan tingkat pengungkapan. Hasil penelitian pada model I berbeda dengan penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) disebabkan perbedaan penggunaan indeks pengungkapan dan media pengungkapan. Setyaningrum dan Syafitri (2012) menggunakan indeks pengungkapan yang bersumber pada SAP dan Permendagri No. 13/ 2006 sedangkan pada penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan informasi keuangan yang bersumber pada Instruksi Presiden No 7 tahun 2015. Selain itu pada penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) tidak dilakukan pada media *website* pemerintah daerah tetapi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.6.2 Pengaruh *leverage* terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah

Hasil penelitian berdasar tabel 4.16 menunjukkan bahwa untuk variabel *leverage* pemerintah daerah pada model I dan II memiliki nilai signifikansi di atas 0.05 dengan koefisien regresi berarah negatif sehingga *leverage* pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah. H₃ yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah tidak terdukung. H₄ yang

menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah tidak terdukung.

Hasil ini menunjukkan besar kecilnya *leverage* tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di *website* pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori sinyal. Giroux dan McLelland (2003) menyebutkan bahwa kondisi keuangan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan, karena pengungkapan kondisi keuangan menjadi sinyal yang bisa menjadi dorongan dalam melakukan pemilihan umum, pengajuan dan pengawasan kredit dan pengguna lainnya informasi keuangan. *Leverage* merupakan sinyal yang menandakan bahwa pemerintah daerah masih memerlukan sumber pembiayaan lain selain dari dana transfer dan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan *leverage* tidak dapat menjadi sinyal yang mendorong dilakukannya pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di *website* pemerintah daerah.

Hudoyo dan Mahmud (2014) menyebutkan bahwa hutang bukan komponen utama pendanaan daerah sehingga besar kecilnya *leverage* tidak diperhitungkan dalam mengungkapkan laporan keuangan di internet. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata *leverage* untuk sampel model I dan II adalah 1% sehingga rata-rata kewajiban yang dijamin oleh aset pemerintah daerah tergolong sangat kecil. Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa dengan melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah memberikan pelayanan bagi masyarakat di masa yang akan datang. Namun, besaran hutang tidak boleh melebihi jumlah modal.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan banyak informasi, karena biaya keagenan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Hubungan keagenan yang terjadi antara kreditur dan pemerintah daerah tidak dapat mendorong terjadinya peningkatan jumlah pengungkapan informasi pada *website* pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan *leverage* tinggi seharusnya mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasi lebih banyak khususnya informasi keuangan untuk meyakinkan kreditur bahwa pemerintah daerah mempunyai aset yang cukup untuk menjamin kewajiban. Pengungkapan informasi dengan media *website* pemerintah daerah seharusnya menjadi cara yang efektif untuk mengurangi biaya keagenan antara pemerintah daerah dengan kreditur. Pengungkapan informasi keuangan merupakan cara untuk meningkatkan transparansi dan sinyal kepada kreditur tentang adanya risiko keuangan pada pemerintah daerah (Araujo & Romero, 2012).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Giroux dan McLelland (2003) dan Araujo dan Romero (2012) yang tidak menemukan hubungan signifikan antara tingkat hutang dan tingkat pengungkapan. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil yang ditemukan Laswad, dkk (2005); Styles dan Tennyson (2007); Rahman dkk (2013); Trisnawati dan Ahmad (2014); Perez, dkk (2014).

Arah negatif dalam hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan Alt dan Lassen (2006). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa meskipun ada tuntutan untuk transparansi, ada juga kesan seberapa jauh pemerintah berusaha untuk menutupi tingkat hutang yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan adanya harapan pemerintah untuk dipilih kembali pada pemilihan yang akan datang. Dengan demikian semakin besar hutang, semakin sedikit informasi yang pemerintah ungkapkan. Penelitian Yusuf (2011) juga menemukan arah negatif dengan alasan manajemen dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mengurangi pengungkapan agar tidak menjadi sorotan kreditur. Pemerintah daerah dengan *leverage* tinggi cenderung mengambil kebijakan untuk mengurangi pengungkapan informasi agar tidak menjadi sorotan pemberi pinjaman (Sinaga dan Prabowo, 2011).

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Laswad *et al* (2005) yang menunjukkan hasil *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan. Pemerintah lokal di New Zealand sangat memperhatikan adanya beban hutang yang tinggi dan pelaporan keuangan di internet merupakan media efektif untuk mengurangi biaya pengawasan oleh kreditur. Sedangkan di Indonesia, adanya beban hutang yang tinggi justru dapat mengurangi jumlah pengungkapan informasi pada *website* pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah di Indonesia belum optimal dalam melakukan transparansi informasi keuangan dan non keuangan.

Rendahnya transparansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia terlihat dari masih rendahnya jumlah *website* pemerintah daerah yang menampilkan informasi keuangan yaitu sebanyak 128 daerah dari 494 *website* daerah kabupaten/kota. Rendahnya transparansi tingkat informasi non keuangan terlihat dengan rendahnya nilai rata-rata indeks informasi non keuangan pemerintah daerah yang hanya 60%.

Leverage yang besar tidak mendorong terjadinya pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di *website* pemerintah daerah. Daerah yang mempunyai rasio hutang yang besar terhadap aset tidak mendapat tekanan untuk memberikan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan dari pemberi pinjaman atau lembaga manapun untuk menyediakan informasi keuangan melalui *website* pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah yang dibutuhkan oleh lembaga pemberi pinjaman diberikan secara rahasia dan tidak diungkapkan untuk informasi publik. Hudoyo dan Mahmud (2014) menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan *leverage* tinggi tidak menyampaikan laporan keuangan secara terbuka. Namun dengan adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah lebih mandiri dalam hal pendanaan, sehingga pemerintah daerah diperbolehkan melakukan pinjaman.

4.6.3 Pengaruh tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada model I dan II memiliki nilai signifikansi t hitung di bawah 0.05 dengan arah koefisien negatif sehingga secara signifikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan. H_5 yang menyatakan ketergantungan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah terdukung. H_6 yang menyatakan ketergantungan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan di *website* pemerintah daerah terdukung.

Koefisien menunjukkan arah negatif mengindikasikan bahwa adanya pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang semakin tinggi menjadikan terjadinya penurunan tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Hendriyani dan Tahar (2015) yang menyebutkan dana perimbangan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan karena kurangnya kontrol dari pemerintah dalam penggunaan dana perimbangan.

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat ketergantungan daerah masih sangat tinggi yaitu pada model I sebesar 65% dan pada model II sebesar 68%. Bahkan di beberapa daerah ditemukan tingkat ketergantungan yang di atas 80%, terutama untuk daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali pendapatan daerahnya untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah masih sangat bergantung dengan dana bantuan dari pemerintah pusat.

Laswad et al (2005) menyebutkan besarnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pada daerah menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja pemerintah yang baik menunjukkan kualitas manajemen yang bermutu sehingga pemerintah yang mandiri cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi. Berdasar hasil penelitian, semakin besar ketergantungan daerah di Indonesia maka semakin kecil tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang dilakukan di *website* pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang kurang baik dapat menjadi alasan pemerintah daerah membatasi pengungkapan informasi. Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2016 menyebutkan bahwa rata-rata nilai evaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota masih C berdasar evaluasi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Pengaruh ketergantungan daerah negatif dan signifikan pada model I dan II dikarenakan pemerintah daerah dengan ketergantungan tinggi menunjukkan kinerja pemerintah yang kurang baik sehingga pemerintah daerah mengurangi pengungkapan informasi yang mereka lakukan terutama melalui *website* pemerintah daerah. Dengan melakukan sedikit pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan di *website* pemerintah daerah, pemerintah berusaha menjaga citra baik di mata publik. Hal ini dapat menjadi dorongan dalam berpolitik dan tujuan lainnya.

Pemerintah daerah dengan dana perimbangan yang besar menggunakan pendapatannya sebagian besar lebih utama untuk pengembangan infrastruktur publik, misalnya jalan dan bangunan publik, daripada pengembangan infrastruktur internet. Martani dan Liestiani (2012) menyebutkan dana bantuan dari pusat ditransfer tanpa memperhatikan laporan kepatuhan sehingga pemerintah daerah tidak termotivasi melakukan pengungkapan. Hendriyani dan Tahar (2015) menyebutkan bahwa pemerintah daerah cenderung melaporkan laporan keuangan hanya untuk mengejar opini wajar, tanpa memperhatikan kualitas pengungkapan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori keagenan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat sebagai prinsipal dan agen dalam hubungan ketergantungan daerah. Pemerintah pusat sebagai prinsipal yang mempunyai sumber dana dan pemerintah daerah yang berperan sebagai agen dalam menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tentunya mempunyai informasi yang lebih banyak tentang daerahnya. Semakin besar dana

transfer yang diberikan, pemerintah pusat akan menuntut informasi yang besar pula sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hal tersebut. Semakin besar ketergantungan daerah justru semakin kecil pengungkapan informasi keuangan dan nonkeuangan yang dilakukan melalui *website* pemerintah daerah.

Dikaitkan dengan teori sinyal, pemerintah daerah memberikan sinyal kepada pemerintah pusat dimana daerah dengan tingkat ketergantungan daerah yang tinggi namun mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan dengan tingkat rendah di websitenya memberikan sinyal bahwa daerah tersebut masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat terutama untuk pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Oktavya (2015) menyebutkan aspek penting penunjang keberhasilan *e-government* antara lain adalah kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang cukup dan memadai dan adanya dukungan dana dari pemerintah.

Dengan belum meratanya pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah di Indonesia memberikan sinyal bagi masyarakat luas dan pemerintah bahwa di beberapa daerah masih terjadi hambatan dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh masih lemahnya sumber daya manusia atau ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai.

Tabel 4.17
Hasil uji t dan simpulan terhadap hipotesis

No	Uraian	Hipotesis	Hasil	Simpulan
1	Model I			
	AGE	Positif, signifikan	Positif, tidak signifikan	Hipotesis tidak terdukung
	LN(LEV)	Positif, signifikan	Negatif, tidak signifikan	Hipotesis tidak terdukung
	DEP	Signifikan	Negatif, Signifikan	Hipotesis terdukung
2	Model II			
	AGE	Positif, signifikan	Positif, signifikan	Hipotesis terdukung
	LEV	Positif, signifikan	Negatif, tidak signifikan	Hipotesis tidak terdukung
	DEP	Signifikan	Negatif, Signifikan	Hipotesis terdukung

Sumber: data diolah, 2017

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh umur pemerintah daerah, *leverage*, dan ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah. Model persamaan terbagi menjadi dua yaitu model I untuk variabel dependen tingkat pengungkapan informasi keuangan dan model II untuk variabel dependen tingkat pengungkapan informasi non keuangan. Sampel penelitian adalah 128 daerah pada model I dan 360 daerah pada model II.

Umur pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan pada model I tetapi tidak berpengaruh pada model II. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur pemerintahan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan karena pengungkapan informasi keuangan baru diamanatkan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015, sehingga daerah yang lama atau baru berdiri secara bersama-sama mengungkapkan informasi keuangan mulai tahun tersebut.

Umur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada *website* pemerintah daerah karena semakin lama umur suatu daerah maka pengalaman pemerintahan lebih lama sehingga catatan administrasi tentang nilai positif daerah berdasar kegiatan yang telah dilakukan dan informasi non keuangan lebih banyak. Daerah yang telah

lama berdiri memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi non keuangan lebih banyak kepada publik sehingga umur daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada *website* pemerintah daerah.

Leverage tidak berpengaruh signifikan pada model I dan II. Rata-rata *leverage* pemerintah daerah di Indonesia adalah 1% dan ini tergolong kecil sehingga tidak dapat menjadi dorongan pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangan dan keuangan di *website* pemerintah daerah kepada kreditur. Ketergantungan daerah berpengaruh signifikan negatif pada model I dan II. Ketergantungan daerah yang tinggi mencerminkan masih rendahnya kinerja aparatur pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah cenderung tidak melakukan banyak pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* pemerintah daerah untuk menghindari sorotan publik.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah indeks pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah tidak mencantumkan seluruh laporan keuangan pemerintah daerah seperti laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sehingga tidak dapat menambah poin bagi *website* pemerintah daerah yang menampilkan laporan tersebut. Nilai *adjusted r square* yang kecil membuktikan masih banyak variabel independen lain di luar penelitian ini yang tidak dimasukkan.

5.3 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah item untuk indeks pengungkapan informasi keuangan yang ditampilkan di *website* pemerintah daerah misalnya laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambah variabel independen lainnya karena berdasar penelitian terdahulu masih sangat banyak variabel yang belum dimasukkan dalam penelitian ini misalnya tipe daerah, tingkat pendidikan penduduk, jumlah pengguna internet, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, R. D., & Haryanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(3): 1-11
- Alvarez, Sanchez & Dominquez. 2008. Voluntary and Compulsory Information Disclosed Online: The Effect of Industry Concentration and Other Explanatory Factors. *Online Information Review*,
- Araujo, J. F., & Tejedro-Romero, F. 2012. Political and Economic Determinant of Information Transparency in Spanish Local Government. 4th *Global Conference in Transparency Research*: 1-17
- Bisma, I D., & Susanto, H. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *GanecSwara Edisi Khusus* 4(3): 75-86.
- Caba Perez, C., Rodrigues Bolivar, M.P., & Lopez Hernandez, A.M. 2014. The Determinants of Government Financial Reports Online. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 42E: 5-31
- Do, S. J., Davey, H., and Coy D. 2011. Assesing Accountability of Organizations Using the Internet to Report: South Korean Local Government. *Journal of Finance and Management in Public Services* 12(1)
- Fakhrudin, Hendy M. 2008. *Istilah Pasar Modal A-Z*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Gracia-Sanchez, I. M., Rodriguez-Domingues, L., & Frias-Aceituno, J. V. 2013. Determinants of Corporate Social Disclosure in Spanish Local Governments. *Journal of Cleaner Production* 39: 60-72
- Gujarati, D. & Porter, C. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5 buku 1*. Salemba Empat. Jakarta
- Giroux, G., & McLelland, A. 2003. Governance Structure and Accounting at Large Municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy* 22: 203-230
- Hendriyani, R. & Tahar, A. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 22(1): 25 – 33

- Hermana, B, A. Tarigan, H. Medyawati, & W. Silfianti . 2012. E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web. *3rd International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR* 27: 194-196
- Hermana, B & Silfianti, W. 2011. Evaluating E-Government Implementation by Local Government: Digital Divide in Internet Based Publik Services in Indonesia. *International Journal of Business and Social Science* 2(3): 156-163.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government*. Andi. Yogyakarta
- Ingram, Robert W. 1984. Economic Incentives and The Choice of State Government Accounting Practices. *Journal of Accounting Research* 22(1): 126-144
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 *Pelaksanaan Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah* (TPAD). 6 Mei 2015. Jakarta
- Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 *Pengelolaan Komunikasi Publik*. 25 Juni 2015. Jakarta
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ *Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah* (TPAD). 9 Mei 2012. Jakarta
- Jensen & Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost And Ownership Structures. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.
- Junaedi . 2015. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ketergantungan Daerah, Kompleksitas, Tipe Pemerintah Daerah, Kualitas Audit Dan Tingkat Penyimpangan Anggaran Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reporting. *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta* 2(4): 42-54
- KEMENDAGRI, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. 2016. Hasil verifikasi B12 TPAD Provinsi tahun 2015. Diakses: 07 Oktober 2016
<http://keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan/pages/11-hasil-verifikasi-b12-tpad-provinsi-tahun-2015>
- KEMENKEU. 2016. Transfer Ke Daerah. Diakses: 21 Februari 2017
<http://www.kemenkeu.go.id/transfer-ke-daerah>
- KEMKOMINFO RI, Direktorat e-Government. 2016. Tabel hasil PeGI. Diakses: 07 Oktober 2016
<http://pegi-layanan.go.id/tabel-hasil-peg-4/>
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy* 24: 101-121

- Laura, B., Giunta, F. & Dainelli, F. 2010. Signaling theory and voluntary disclosure to the financial market. *SSRN Electronic Journal*
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmud, A dan Hudoyo, Y.2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laporan Keuangan di Internet oleh Pemda. *Accounting Analysis Journal*.
- Martani, Dwi & dan Lestiani, Annisa. 2012. Disclosure in Local Government Financial Statement: the Case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance* 3(1): 67-84
- Martani, D., Nastiti, D., & Wicaksono, P. 2014. Disclosure of Non Financial Information About Public Services on the Official Website of Local Governments in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 66(2): 500-512
- Marwata. 2001. Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi IV Bandung*. 30-32 Agustus: 155-172.
- Moon, Jae. 2002. The Evolution of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality. *Public Administration Review*: 424-43
- Oktavianti, Heni. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Intelektual Kapital. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 3(5)
- Oktavya, Ayu Aditya. 2015. Penerapan e-Government pada Kantor Pelayanan Pratama. *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 3(3): 1433-1447
- Open Government Indonesia. 2016. Pembentukan Perangkat PPID 2010-2015. Diakses: 6 Oktober 2016
<http://opengovindonesia.org/front/detail/pembentukan-perangkat-ppid>
- Pandansari, Tiara. 2016. Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* XIX(3): 463-484.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 *Pinjaman Daerah*. 6 Juni 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59. Jakarta
- Rahman, A., Sutaryo, & Budiatmono, A. 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting in Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, 1299-1323
- Riduwan. 2013. *Dasar-Dasar Statistika*. Alfabeta. Bandung

- Riduwan & Akdon. 2013. *Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika*. Alfabeta. Bandung
- Robbin, W. A., & Austin, K. R. 1986. Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of The Appropriateness of a Compound Measure. *Journal of Accounting Research*
- Satu Data Indonesia. 2016. Peringkat Indonesia dalam Barometer Open Data 2015. Diakses: 6 Oktober 2016.
<http://data.go.id/konten/peringkat-indonesia-dalam-barometer-open-data-2015/>
- Satu Data Indonesia. 2016. Kenali Lebih Jauh tentang Satu Data Indonesia. Diakses: 6 Oktober 2016.
<http://data.go.id/tentang/>
- Scott, William R. 2012. *Financial Accounting Theory 6th Edition*. Toronto: Pearson Education. Canada
- Serrano-Cinca, C., Rueda-Tomas, M., & Portillo-Tarragona, P. 2008. Factors Influencing E-disclosure in Local Public Administrations. *DTECONZ* 2008(03): 1-44
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9(2): 154-170
- Sofia, A. & Husen, B. 2013. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi pada Website. *Jurnal Manajemen Indonesia* 12(4): 297-308
- Styles, A., & Tennyson, M. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 19 (1): 56-92
- Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan (Edisi III)*. BPFE. Yogyakarta
- The World Bank. 2015. E-Government. Diakses: 24 Juni 2017
<http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government>
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. SNA 17 Mataram, Lombok
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 *Keterbukaan Informasi Publik*. 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta

Yusuf, Muhammad. 2011. Analisa Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan High Profile yang Tercatat Di BEI Pada Tahun 2005-2007. *Binus Bussiness Review*, 2 (11): 571-583